

SKRIPSI

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PESANTREN
DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN
DI ACEH TAHUN 2008-2019**



Disusun Oleh:

**AYU RIZKIANA
NIM. 160602076**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ayu Rizkiana
NIM : 160602076
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 April 2020
Yang Menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ayu Rizkiana'.

Ayu Rizkiana

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PESANTREN DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI ACEH TAHUN 2008-2019


Disusun Oleh:

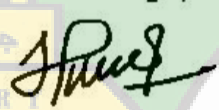
Ayu Rizkiana
NIM. 160602076


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Cut Dian Fitri, M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002


Khairul Amri, SE, M.Si
NIP. 0106077507

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah 

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Tingkat Pendidikan Pesantren Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan
Di Aceh Tahun 2008-2019**

Ayu Rizkiana
NIM. 160602076

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk

Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jumat, 31 Agustus 2020
12 Muharam 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Cut Dian Fitri, M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002


Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 0106077507

Penguji I

Penguji II


Dr. Teuku Meldi Kesuma, SE., MM
NIP. 197505152005041001


Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry


Dr. Zaki Ridwan, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT.PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ayu Rizkiana
NIM : 160602076
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : ayurizkianaayu98@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

Yang berjudul:

Pengaruh Tingkat Pendidikan Pesantren Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Aceh Tahun 2008-2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Juli 2020

Mengetahui,
Penulis

Ayu Rizkiana

Pembimbing I

Cut Dian Fitri, M.Si., Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II

Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 0106077507

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Pesantren Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Aceh Tahun 2008-2019”**. Shalawat dan Salam penulis hantarkan atas keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Dalam pembuatan skripsi ini, banyak kesulitan yang penulis alami terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan bantuan dari semua pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan skripsi yang penulis buat ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik serta berguna dimasa yang akan datang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku ketua dan sekretaris Program studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku pembimbing I dan Khairul Amri, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, serta memberikan arahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.
5. Hafiih Maulana, S.P., S.H.I, M.E selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan saran yang terbaik buat saya, dan seluruh dosen program studi ekonomi syariah UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama ini kepada saya.
6. Karya dan keberhasilan ini ku persembahkan kepada Ayahanda Razali Ibrahim dan Ibunda Nurlaita yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan yang tiada tara demi kesuksesan masa depanku.
7. Kakak dan adek ku tercinta Mirza dan Ariel Riskan yang telah menyemangatiku selama ini hingga keberhasilan ini tercapai.
8. Sahabat seperjuangan di Ekonomi Syari'ah (Nur Azizah Siregar, Novia Sri Umami, Novi Nurul Hiqmah, Mertisa Fardesi, dan Hardinar Rukmana Markhan) yang rela menemani dalam suka duka selama kuliah, teristimewa untuk Kausar Akbar S.E dan Nada Julianda S.E yang telah

memotivasi dan menyemangatiku selama ini, beserta seluruh keluarga besar Ekonomi Syari'ah leting 2016.

9. Akhirnya sebuah perjuangan berhasil ku tempuh walau berawal dari suka dan duka, merunduk meski terbentur, tidak mengeluh meski terjatuh, tapi semangat jiwaku tak pernah pudar. Semoga segala bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Penulis,

Ayu Rizkiana



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun 1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā: رَمَى

qīla: قِيلَ

yaqūlu: يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Talḥah :

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Ayu Rizkiana
NIM : 160602076
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Tingkat Pendidikan Pesantren Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Aceh 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2008-2019
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing 1 : Cut Dian Fitri, M.Si., Ak., CA
Pembimbing 2 : Khairul Amri, SE.,M.Si

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan pesantren dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Menggunakan data panel 23 kabupaten/kota di Aceh selama periode tahun 2008-2019, model regresi panel metode fixed effect dan Granger causality test digunakan untuk menganalisis hubungan fungsional antara ketiga variabel tersebut. Penelitian menemukan bahwa Tingkat Pendidikan Pesantren dalam hasil regresi panel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh dengan nilai koefisien sebesar 0,032. Tingkat Pengangguran Terbuka dalam hasil regresi panel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh dengan nilai koefisien sebesar 0,121. Sedangkan hasil Granger causality test mengindikasikan bahwa kausalitas dua arah terjadi antara tingkat pendidikan pesantren dan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat pendidikan pesantren merupakan respons terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Kata Kunci: Pendidikan pesantren, pengangguran, dan kemiskinan

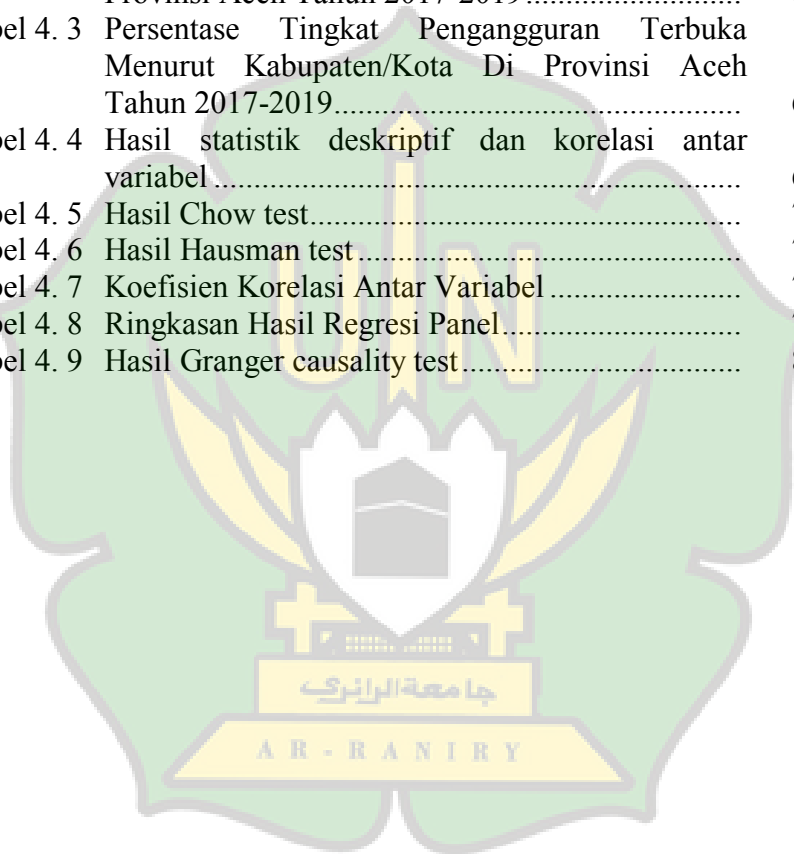
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penelitian	8
BAB II LANDASA TEORI	9
2.1 Kemiskinan	9
2.1.1 Ukuran Kemiskinan	14
2.1.2 Kebijakan Penuntasan Kemiskinan Melalui Pendidikan.....	16
2.2 Pendidikan Pesantren	18
2.2.1 Dasar-Dasar Pendidikan Islam.....	22
2.3 Pengangguran.....	27
2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	30
2.5 Keterkaitan Antar Variabel	34
2.5.1 Pengaruh Pendidikan Pesantren Terhadap Kemiskinan	34
2.5.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan .	41
2.6 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan.....	43
2.7 Kerangka Penelitian	44
2.8 Hipotesis Penelitian.....	45

BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Batasan Variabel	46
3.2 Jenis Penelitian.....	46
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	46
3.4 Teknik Analisis Data.....	47
3.5 Metode Analisi Data	49
3.5.1 Penentuan Model Estimasi.....	49
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	51
3.5.3 Penguji Hipotesis	53
3.5.4 Pengujian Hipotesis secara Parsial (T).....	54
3.5.5 Pengujian Hipotesis secara Simultan (F)	55
3.5.6 Pengujian Granger Causality Test.....	55
3.6 Operasional Variabel.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Statistika Deskriptif.....	58
4.1.1 Tingkat Kemiskinan	58
4.1.2 Pendidikan Pesantren	60
4.1.3 Tingkat Pengangguran	63
4.2 Hasil Statistik Deskriptif dan Korelasi Antar Variabel	65
4.2.1 Hasil Uji Chow dan Uji Hausman.....	69
4.3 Analisis Regresi Data Panel	73
4.3.1 Granger Causality Test.....	76
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian Sebelumnya	32
Tabel 3. 1	Definisi Operasional Variabel	60
Tabel 4. 1	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh 2017-2019.....	61
Tabel 4. 2	Persentase Santri Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2017-2019	64
Tabel 4. 3	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2017-2019.....	66
Tabel 4. 4	Hasil statistik deskriptif dan korelasi antar variabel	68
Tabel 4. 5	Hasil Chow test.....	72
Tabel 4. 6	Hasil Hausman test	73
Tabel 4. 7	Koefisien Korelasi Antar Variabel	75
Tabel 4. 8	Ringkasan Hasil Regresi Panel.....	76
Tabel 4. 9	Hasil Granger causality test	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	48
Gambar 4. 1 Rata-rata Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten Prov Aceh 2008-2029	63
Gambar 4. 2 Rata-rata Tingkat Pendidikan Pesantren Menurut Kabupaten Prov Aceh 2008-2019	65
Gambar 4. 3 Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten Prov Aceh 2008-2019	67
Gambar 4. 4 Residual Metode Random effect Model	74
Gambar 4. 5 Residual Metode Fixed Effect.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah berusaha membentuk program-program untuk mengatasi kemiskinan terjadi di Indonesia. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan beberapa strategi dengan membentuk perlindungan keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dari semua bidang. Serta memberikan suatu pelatihan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan yang sesuai pada setiap individu untuk melakukan usaha agar mencegah terjadinya kemiskinan yang baru. Upaya pengentasan kemiskinan tersebut ialah suatu keinginan setiap Negara dengan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015).

Ekonomi di Indonesia khususnya di masyarakat masih banyak menghadapi persoalan-persoalan dasar yang serius dan harus ditangani seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, penyediaan lapangan kerja dan lain sebagainya, sedangkan trobosan dan program pemerintah tidak mampu untuk mengatasi permasalahan di atas secara menyeluruh dan merata maka diperlukan adanya lembaga atau instansi yang bisa membantu untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran tersebut.

Pesantren adalah salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia juga dianggap mempunyai potensi dan peran dalam mengembangkan ekonomi masyarakat guna untuk membantu pemerintah dalam usaha mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat keberhasilannya dari beberapa indikator perekonomian, satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Pengangguran sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Poyoh, 2017).

Masalah kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh banyak negara-negara berkembang salah satunya yaitu Indonesia yang yang terjadi akibat sumber daya manusia (SDA) yang terbatas, pengetahuan tentang teknologi yang masih rendah dan lapangan pekerjaan yang masih tidak tercukupi (Kholis, 2014).

Institusi pendidikan di Indonesia belum mampu bekerja optimal melahirkan sumber daya manusia yang mampuni. Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Human Development Report (HDR), United Nation Development Programme (UNDP) melaporkan bahwa pada tahun 2011,

peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index) Indonesia yang mencakupi komposisi peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala berada di urutan 124 dari 183 negara yang ada di dunia (Majid, 2014).

Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, Aceh juga memiliki berbagai masalah menyangkut kualitas pendidikan. Aceh yang mendapat jatah dana pembangunan Rp 11,1 triliun pada tahun 2010, dan 30% dari jumlah tersebut harus dialokasikan untuk memajukan bidang pendidikan, namun kualitas pendidikan Aceh tergolong sangat rendah dibandingkan dengan 34 Provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Misalnya, prestasi siswa Aceh di bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2011 hanya menduduki peringkat 25 di Indonesia. Fakta ini sungguh bertolak belakang dengan anggaran besar yang dimiliki Aceh saat ini (Majid, 2014).

Permasalahan pengangguran yang terjadi saat ini sangat sering dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan indikator ekonomi pada Negara tersebut yang akan mempengaruhi tingkat pengangguran seperti inflasi, kemiskinan, dan besarnya upah minimum yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran (Sukirno, 2008).

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga akan rendah. Pengangguran memang kini belum bisa terlepas dari salah satu bagian masalah yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Pengangguran dinegeri ini, masih menjadi masalah aktual yang menjadi bahasan panjang sejak orde baru tumbang dan Indonesia dicap sebagai negara yang cukup terganggu perkembangan perekonomiannya (Poyoh, 2017).

Aceh dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah pemerintahannya. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan yang dasar seperti makanan dan non makanan seperti pakaian dan kesehatan yang dipengaruhi oleh pendapatan dan pengeluaran. Penduduk miskin dikategorikan sebagai penduduk yang pengeluaran per kapita pengeluarannya kurang dari atau rata-rata dibawah garis kemiskinan. Menurut data BPS, Provinsi Aceh berada di urutan ketujuh di Indonesia untuk tingkat kemiskina pada tahun 2012. Walaupun secara umum dari tahun ke tahun pemerintah Aceh telah berhasil menekan angka kemiskinan pada tahun 2005 (Munawar, 2015). Angka kemiskinan di provinsi Aceh apabila

dibandingkan dengan daerah lainnya masih menduduki posisi sepuluh besar ditinjau dari persentase kemiskinan, namun jika ditinjau dari sebaran berdasarkan jumlah penduduk mungkin saja masih relative sedikit karena jumlah penduduk Provinsi Aceh lebih sedikit dibandingkan daerah lainnya seperti di pulau Jawa (Nasir, 2014).

Dengan menurunkan angka pengangguran di Aceh diharapkan juga mampu untuk menurunkan jumlah angka kemiskinan di Aceh. Pengangguran adalah suatu keadaan seseorang yang masih tergolong angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan tetapi masih belum bekerja dengan alasan tertentu dan masih belum memperoleh pekerjaan tersebut. Selain itu, pengangguran juga akan sangat berpengaruh terhadap kemiskinan dengan adanya kekurangan dalam masyarakat dan rumah tangga seperti hal nya konsumsi, pakaian, gizi, kesehatan, dan lain sebagainya karena dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, sebab itu bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* (tingkat pendapatan) dengan *consumption poverty rate* (tingkat konsumsi) (Aristina, 2017).

Munculnya pesantren di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak 300-400 tahun dan menjangkau hampir di seluruh lapisan masyarakat muslim di Indonesia terutama di Provinsi Aceh (Sidiq, 2013). Uniknya Pendidikan Pesantren bukan karena keberadaan saja, tetapi karena lembaga agama telah menerapkan budaya, metode dan jaringan (Fawait, 2013). Pondok pesantren yang melembaga di masyarakat, terutama di pedesaan merupakan

lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia (Maksum, 2015). Pesantren, jika dilihat dari sejarah, sosiologis dan antropologis, lembaga ini seharusnya dipandang sebagai lembaga pendidikan alternatif di Indonesia. Namun pemerintah terkesan melihat sebelah mata dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Di satu sisi pemerintah mengakui produk-produk atau kualitas lulusan pesantren akan tetapi disisi lain pesantren tetap pesantren yang tidak secara utuh diakui sebagai lembaga pendidikan.

Mengacu pada uraian di atas, maka pendidikan pesantren yang relatif rendah, pengangguran yang relatif tinggi dan kemiskinan yang relatif masih tinggi dapat menghambat pembangunan perekonomian daerah Aceh. Karena itu penelitian ini memilih judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Pesantren Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Aceh Tahun 2008-2019”**.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Apakah pendidikan pesantren berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Aceh tahun 2008-2019 ?
2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Aceh tahun 2008-2019 ?
3. Apakah pendidikan pesantren dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Aceh tahun 2008-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh pendidikan pesantren terhadap kemiskinan di Aceh periode tahun 2008-2019 dalam 23 kabupaten.
2. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Aceh periode tahun 2008-2019 dalam 23 kabupaten.
3. Menganalisis apakah pendidikan dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Aceh periode tahun 2008-2019 dalam 23 kabupaten.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut.

1. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menganalisis tentang pendidikan dan pengangguran di Aceh yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah pendidikan dan pengangguran dapat berpengaruh terhadap kemiskinan di Aceh dalam mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pengembangan perekonomian.
2. Dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya referensi penelitian yang berhubungan dengan pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan serta keterkaitan antara objek ketiganya di Aceh.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan empat sub bab yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini penulis mengkaji landasan teori yang digunakan berdasarkan literatur dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti untuk mengembangkan hipotesis dan menjalankan fenomena hasil penelitian sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang batasan variabel, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data, metode analisis data, pengujian granger causality test, dan operasional variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan serta penjelasan dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan kesimpulan dan saran yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

LANDASA TEORI

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk provinsi Aceh dimana kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang terus-menerus dapat dikaji, bukan saja karena kemiskinan telah memberikan dampak terhadap masyarakat, melainkan karena hingga kini kemiskinan masih belum bisa diatasi dan bahkan gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang terjadi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kesenjangan dan pelebaran jurang antara si kaya dan si miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai persoalan, baik persoalan sosial maupun persoalan politik di masa yang akan datang (Setyadi, 2017).

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran

ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu (Prastyo,2007).

Kemiskinan di Aceh umumnya terjadi di pedesaan, dengan sekitar 30 persen keluarga di wilayah pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan kurang dari 15 persen di wilayah perkotaan. Secara geografis, wilayah yang terletak dekat Banda Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, sementara daerah-daerah di wilayah tengah dan selatan Aceh menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan serta pertanian sebagai kegiatan utama keluarga juga terkait secara positif dengan kemiskinan (BPS, 2008).

Dalam rangka untuk mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, yang berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan. Beberapa diantaranya yang menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan yang perlu tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan dan pemerataan tingkat upah, peningkatan pendidikan masyarakat, pengendalian inflasi, serta perluasan lapangan kerja (Setyadi, 2017). Menurut BPS (2007), seseorang masuk dalam kriteria miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan.

Dimensi-dimensi kemiskinan dapat dilihat dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat

mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Aristina, 2017).

Pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas (Aristina, 2017).

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan dengan persoalan yang terjadi pada suatu Negara baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan moral. Menurut Badan Pusat

Statistik (BPS), kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar dalam hidup yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi (Aristina, 2017).

Masalah kemiskinan di Aceh cukup kompleks karena beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami fluktuasi sejak tahun 2017 hingga 2019. Fluktuasi jumlah penduduk miskin tersebut bahkan cenderung menurun dan meningkat selama kurun waktu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Aceh selama kurun waktu tersebut belum maksimal dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Aceh.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Tingkat pendidikan santri memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka mengurangi angka

kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh oleh seluruh penduduk di Aceh (Ramdhan, 2017).

Permasalahan kemiskinan di Aceh tidak terlepas dari banyaknya jumlah pengangguran selama kurun waktu yang sama. Tingkat kemiskinan juga dapat disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang sangat besar, serta tingkat pendidikan masyarakat. Pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa, karena pendidikan yang berkualitas dapat menentukan kualitas dari pembangunan (Amalia, 2017).

Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 61

وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya :”Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang

memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.”

Qur'an Surat Al-Isra Ayat 26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

2.1.1 Ukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga (Saputra, 2011), yaitu:

1. Kemiskinan absolut

Adalah bila pendapatan seseorang tidak dapat mencapai kebutuhan hidup minimum (makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan). Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan relatif

Adalah dimana sebenarnya pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan minimum, tetapi masih dianggap miskin karena masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya. kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3. Kemiskinan kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Menurut Chambers, kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

3. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan (Nasikun, 2001).

2.1.2 Kebijakan Penuntasan Kemiskinan Melalui Pendidikan

Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Hal ini berarti fakir miskin dan anak terlantar tersebut menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk masa depan mereka. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan penghasilan dan tidak mempunyai sanak saudara. Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan, namun tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, fakir miskin ini perlu perhatian khusus, terutama bagi pemerintah. Sasaran utama pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 adalah cerdasnya kehidupan bangsa, majunya kebudayaan nasional, dan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia secara berkeadilan. Oleh karena itu perlu upaya pembangunan yang pada hakekatnya

merupakan proses transformasi budaya menjadi peradaban bangsa yang maju, modern, dan demokratis.

Menurut Soedjiarto (2008), pendidikan nasional diselenggarakan belum maksimal dan wajib belajar belum juga gratis. Padahal hal ini yang akan mampu meningkatkan produktivitas nasional dan selanjutnya akan mengikis kemiskinan. Kemiskinan pada hakekatnya merupakan akibat terbatasnya kesempatan kerja. Kesempatan kerja tertutup dapat disebabkan oleh kualifikasi kemampuan yang dituntut tidak terpenuhi dan tidak terpenuhinya kualifikasi kemampuan disebabkan karena tidak mengikuti pendidikan yang bermutu, memerlukan biaya yang tidak mungkin ditanggung oleh mereka yang miskin. Oleh karena itu masalah kemiskinan dapat diatasi melalui pemberian kesempatan untuk mengikuti program pendidikan dan berbagai latihan yang bermutu, seperti pendidikan gratis, pemberian beasiswa kepada peserta didik, dan kesempatan kerja yang luas serta pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui pendidikan yang bermutu dan merata akan melahirkan manusia terdidik yang cerdas, berkarakter, dan terampil atau profesional yang siap memasuki dunia kerja. Dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah membuka kesempatan kerja dan membayar pajak yang memungkinkan pemerintah memberikan kesejahteraan masyarakat, mampu membiayai tanggung jawab konstitusionalnya, yaitu memberikan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan social (Kholis, 2014).

2.2 Pendidikan Pesantren

Asal kata "pesantren" adalah pe-"santri"-an, kata "santri" artinya murid dalam bahasa Jawa. Istilah "pondok" berasal dari bahasa Arab "funduq" ("قودنف") yang berarti penginapan (Zulhimma, 2013). Khusus di Aceh, pesantren disebut juga dengan nama "dayah". Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan daerah dilihat dari aspek sumber daya manusia. Oleh karena itu pendidikan pesantren sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan pesantren meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non-formal.

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua yang melekat dalam perjalanan kehidupan Indonesia sejak ratusan tahun yang silam, ia adalah lembaga pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga unik dan punya karakteristik tersendiri yang khas, sehingga saat ini menunjukkan kapabilitasnya yang cemerlang melewati berbagai episode zaman dengan pluralitas polemik yang dihadapinya. Pesantren juga melayani kebutuhan (*needs*) pendidikan ketika masyarakat memerlukannya, terutama ketika lembaga-lembaga pendidikan modern yang pada umumnya bersifat formal, belum mampu menembus ke pelosok desa. Pada saat itu dunia pesantren menjadi simbol yang menghubungkan dunia pedesaan dengan dunia luar (In'am, 2010).

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang memerankan fungsi sebagai institusi sosial (Syam, 2005). Sebagai institusi sosial pesantren memiliki dan menjadi pedoman etika bagi masyarakat, karena pesantren adalah institusi yang melegitimasi berbagai moralitas yang seharusnya ada dalam masyarakat, karena institusi sosial pada hakikatnya muncul dan berkembang berkat tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pesantren merupakan produk sejarah yang terus berkembang mengikuti zaman, masing-masing memiliki karakteristik berlainan baik menyangkut sosio-politik, sosio-kultural, sosio-ekonomi maupun sosio-religius.

Pendidikan pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi) dan pada pendidikan non formal yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ulama *salafus shaleh* khususnya dalam bidang fiq'h, Hadist, Tafsir, Tauhid, dan Tasawuf.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan sekolah, (madrasah, sekolah umum, kejuruan, dan perguruan tinggi) serta pendidikan luar sekolah berupa kursus-kursus keahlian (life skill), untuk menunjang kehidupan santri pasca mengikuti pendidikan pesantren, karena pesantren tidak mencetak santrinya untuk menjadi pegawai pemerintah (PNS), tetapi lebih menitikberatkan kepada kemandirian santri yang tidak meng-ekor atau menjadi beban orang/lembaga lain. Tujuan pendidikan di pesantren memang tidak dimaksudkan untuk

menyiapkan tenaga kerja terampil pada sektor-sektor modern, sebagaimana sekolah dan universitas pada umumnya. Pendidikan di pesantren di orientasikan pada pendidikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam. Para santri diantarkan untuk menjadi alim dan shalih, yang menjadi agen perubahan di masyarakat. Dalam perkembangannya ke depan, pesantren tetap harus menjadi “rumah”, menjadi pertahanan mental spiritual sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan masa (Kesuma, 2017).

Menurut asal katanya Pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan awalan *pe* dan akhiran *an* yang menunjukkan tempat, dengan demikian Pesantren artinya tempat para santri, sedangkan menurut Sadjoko Prasodjo, pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non klasikal, di mana seorang kyai mengajarkan ilmu agama kepada santri-santri berdasarkan kitab yang ditulis dalam bahasa arab oleh ulama abad pertengahan (Mubarak, 2009).

Ada dua alasan mengapa pesantren bisa menjadi pelopor perekonomian umat. Pertama, santri adalah golongan masyarakat yang berkomitmen tinggi dengan agamanya. Komitmen para santri dalam agamanya dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan para santri. Kedua, fokus kegiatan pesantren pada kajian-kajian keislaman dapat membuatnya menjadi penggerak ekonomi syariah di masyarakat sekaligus melahirkan entrepreneur muda yang berjiwa islami (Muttaqin, 2011). Optimalisasi semua sumber daya yang dimiliki pesantren dapat tercipta sebuah kekuatan besar dalam perekonomian bila dikelola dengan baik.

Dari segi aset misalnya, pesantren bisa memanfaatkan luasnya tanah yang mereka miliki untuk digunakan dalam kegiatan bercocok tanam. Pekerja dari kegiatan bercocok tanam tersebut bisa saja para santri yang dilakukan secara bergantian atau bisa pula dengan memperkerjakan masyarakat di sekitar pesantren sebagai petani yang mengelola tanah tersebut. Hasil panen yang didapat bisa dijual untuk membiayai kegiatan operasional pesantren. Selain itu, pesantren juga dapat memanfaatkan aset lain yang dimilikinya untuk ditujukan pada sektor perekonomian. Pemanfaatan aset ini harus dibarengi dengan manajemen aset yang baik dari pihak pesantren agar pemanfaatan aset dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya dari segi sumber daya manusia, para santri bisa dibekali skill untuk berwirausaha agar pesantren bisa memiliki sebuah badan usaha yang bisa menjadi penopang kegiatan perekonomian para santri dan masyarakat (Adnan, 2018).

Santri adalah peserta didik yang dimiliki oleh Pondok Pesantren yang dititipkan oleh orang tuanya pada pesantren untuk mempelajari beberapa kegiatan pendidikan agama Islam, dalam hal ini Pondok Pesantren membagi tiga (3) bagian yaitu;

1. Santri yang mukim dan menetap di asrama yang sudah disediakan oleh pondok pesantren yang disebabkan karena jarak antara pondok pesantren dan rumahnya yang relatif jauh baik dari Aceh maupun luar Aceh, atau anak sekitar pesantren tetapi mukim di pesantren dan harus mengikuti kegiatan selama 24 jam sampai pada hari libur pesantren.

2. Santri yang berasal dari sekitar Pondok Pesantren yang tidak menetap di asrama yang sudah disediakan oleh pondok pesantren, mereka hanya mengikuti sekolah atau hanya mengikuti dayah, tidak dituntut mengikuti semua kegiatan pondok pesantren.
3. Santri dari luar Pondok Pesantren yang datang dari beberapa wilayah yang hanya mengikuti sekolah formal (umum) yang sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing dan kegiatan mereka hanya dari pagi sampai siang hari (Wadi, 2018).

2.2.1 Dasar-Dasar Pendidikan Islam

Ilmu-ilmu agama di pahami sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fi al-din*) yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Salah satu hal yang dapat dirasakan dengan hadirnya pesantren adalah pembentukan kader-kader ulama serta pengembangan keilmuan Islam (Usman, 2013).

Agar pendidikan dapat melaksanakan fungsinya, pendidikan memerlukan acuan pokok yang mendasarinya. Acuan yang menjadi dasar bagi pendidikan adalah nilai yang tertinggi dari pandangan hidup suatu masyarakat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Dalam menetapkan sumber pendidikan Islam, para pemikir Islam mempunyai beberapa pendapat. Abdul Fattah Jalal, misalnya, membagi sumber pendidikan Islam kepada dua macam, yaitu, pertama, sumber Ilahi, yang meliputi al-Qur'an, al-Hadîts, dan alam semesta sebagai ayat kauniyah yang perlu ditafsirkan kembali. Kedua, sumber insaniah, yaitu lewat proses ijtihad

manusia dari fenomena yang muncul dan dari kajian lebih lanjut terhadap sumber Ilahi yang masih bersifat global (Jalal, 1988).

Pakar pendidikan Islam lainnya membagi sumber atau dasar nilai yang dijadikan acuan dalam pendidikan Islam kepada tiga, yaitu al-Quran, al-Hadīts, serta Ijtihad (Nizar, 2001) para ilmuwan muslim yang berupaya memformulasi bentuk sistem pendidikan Islam yang dituntut oleh perkembangan zaman, sedangkan pemecahannya tidak terdapat di dalam kedua sumber utama di atas. Disamping itu sumber-sumber di atas, Ayumardi Azra menyebutkan beberapa sumber lain seperti : kata-kata Sahabat, kemaslahatan masyarakat dan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial (Azra, 1999).

Al-Quran sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW., al-Qur'an menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan utama. Al-Qur'an merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Keuniversalan ajarannya mencakup ilmu pengetahuan yang tinggi dan sekaligus merupakan kalam mulia yang esensinya tidak dapat dimengerti, kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. Al-Qur'an diturunkan Allah untuk menunjuki manusia ke arah yang lebih baik. Firman Allah Swt :

Quran Surat An-Nahl Ayat 64

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”

Al-Qur'an menduduki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa hal yang sangat positif guna pengembangan pendidikan.

Dalam konfigurasi sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu variasi dari konfigurasi sistem pendidikan nasional, tetapi kenyataannya pendidikan Islam tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Apabila dirasakan, memang terasa janggal bahwa dalam komunitas masyarakat Muslim, pendidikan Islam tidak mendapat kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Apalagi perhatian pemerintah yang dicurahkan pada pendidikan Islam sangatlah kecil porsinya, padahal masyarakat Indonesia selalu diharapkan agar tetap berada dalam lingkaran masyarakat yang sosialis religius (Muslih, 1991). Tetapi justru pendidikan Islam lebih banyak menunjukkan pola swadaya. Sehingga walaupun tanpa perhatian dari stakeholder, pendidikan Islam tetap dapat berkembang dengan baik. Bahkan sama sekali bukan menjadi beban, tetapi sebaliknya menjadi kebanggaan bangsa di tengah minimnya perhatian pengambil kebijakan pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sebuah negara jika didukung oleh masyarakatnya yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Teori pertumbuhan modern menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan dalam rangka mendorong dan meningkatkan produktivitas, dimana pertumbuhan produktivitas tersebut pada gilirannya merupakan motor penggerak pertumbuhan. Modal manusia dalam terminologi ekonomi digunakan untuk bidang pendidikan dan berbagai kapasitas manusia lainnya, yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan kunci dalam kemajuan perekonomian di suatu negara. Pendidikan merupakan alat untuk mengadopsi teknologi modern, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat (Todaro dan Smith, 2003).

Fokus pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pesantren, perbaikan kurikulum, bahkan sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang merupakan kelanjutan dari Program Wajib Belajar

6 Tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk di masa mendatang (BPS, 2017).

Samuelson (2004) menyebutkan bahwa input tenaga kerja (sumber daya manusia) terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Dari banyaknya segi ekonomi akan percaya bahwa kualitas input dari tenaga kerja yakni adanya keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan faktor paling penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Negara tersebut akan mampu membeli suatu alat dan mesin yang canggih tetapi tidak akan bekerja apabila tidak mempekerjakan sumber daya manusia yang bekerja dengan terampil dan terlatih dan tidak dapat memproduksi barang dan memanfaatkan barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf dan berkualitas serta kemampuan dalam menggunakan komputer akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya berkembang secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara sisi lain pengembangan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan pesantren pada akhirnya akan menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam

masyarakat pada masa yang akan datang, memindahkan ilmu pengetahuan, memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat, untuk memberantas kebodohan, menghilangkan salah pengertian, memberi bimbingan dalam hidup, menolong dalam menghadapi kesukaran, mensejahterakan penduduk dan menentramkan batin. Pendidikan dasar memiliki fokus utama dalam memberantas buta huruf. Pemberantasan buta huruf menjadi indikator yang mendasar dalam keberhasilan proses pendidikan.

2.3 Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Samuelson, 2004). Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada.

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan sangat mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Poyoh, 2017).

Serupa dengan pengertian di atas, Sadono Sukirno (2004: 28) mengatakan bahwa pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase dari individu-individu yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Seseorang dianggap menjadi penganggur jika tidak bekerja namun masih menunggu untuk mendapatkan pekerjaan (Retnowati, 2014).

Islam telah memperingatkan ummatnya agar tidak menganggur, hal ini tertera dalam Al-Qur'an surat An-Naba' ayat 11 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya: “Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,”

Menurut Qardhawi (2005) pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Pengangguran Jabariyah (terpaksa)

Adalah pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya atau seseorang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilan ini tidak berguna sedikitpun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.

- b. Pengangguran Khiyariyah. Pengangguran Khiyariyah adalah seseorang yang memilih untuk menganggur padahal pada dasarnya mampu untuk bekerja.

Adanya pembagian kedua kelompok ini mempunyai kaitan erat dengan solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok pengangguran *jabariyah* perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya, Islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk pengangguran *khiyariyah* karena pada prinsipnya mereka memang tidak memerlukan bantuan karena pada dasarnya mereka mampu untuk bekerja hanya saja mereka malas untuk memanfaatkan potensinya dan lebih memilih menjadi beban bagi orang lain.

Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk baik terhadap perekonomian, seperti pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai. Pengangguran dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya keterampilan dan pengangguran menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan politik. Pengangguran adalah masalah ketenagakerjaan yang sering dihadapi oleh setiap negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Menurut BPS pada sensus 2010, pengangguran didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64) tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran jika dibiarkan secara terus menerus tentunya akan berdampak negatif bagi suatu daerah atau negara. Contoh dampak negatif yang terjadi

akibat banyaknya pengangguran adalah kriminalitas dan kemiskinan (Aristina, 2017).

Salah satu aspek untuk mengukur kinerja perekonomian pada suatu Negara adalah tingkat pengangguran. Apabila tingkat pengangguran yang rendah maka Negara tersebut memiliki perekonomian yang baik, begitu pula sebaliknya, apabila tingkat pengangguran yang tinggi maka Negara memiliki permasalahan ekonomi yang dapat menyebabkan kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan (BPS).

Pengangguran merupakan seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Untuk mengukur tingkat pengangguran dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) yaitu persentase penduduk pencari pekerjaan (yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak bekerja tetapi bersedia bekerja apabila ada yang menyediakan, yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai kerja) terhadap angkatan kerja (BPS, 2004).

2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian sebelumnya menurut Amalia (2017) menyatakan bahwa Angka Melek Huruf berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Hal ini dapat diketahui dari nilai t-statistic AMH $-4,709 < t\text{-tabel } 1,69$ dan probabilitas 0.0000 dengan tingkat $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti semakin

tinggi Pendidikan maka kemiskinan di Sumatera Utara semakin menurun. Koefisien variabel pendidikan (AMH) sebesar -1.216776 berarti setiap peningkatan pendidikan sebesar 1% dapat menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,21 % dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arfan poyoh, Gene H. M. Kapantow, dan Juliana R. Mandei (2017) yang menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengujian data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, dari ketiga faktor yakni tingkat upah, inflasi dan pertumbuhan PDRB, yang berpengaruh nyata terhadap tingkat pengangguran di provinsi Sulawesi Utara adalah faktor tingkat upah, sedangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh nyata.

Dalam penelitian lainnya dari Prastyo (2010) menyatakan bahwa hasil uji koefisien determinasi (R^2) pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa besarnya nilai R^2 cukup tinggi yaitu 0,982677.

Dalam penelitian Ramdhan (2017) menyatakan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kota Samarindamasih rendah karena pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat pengangguran di Kota Samarinda.

Sedangkan dalam penelitian dari Novriansyah (2018) menyatakan bahwa Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo cukup berfluktuasi di Provinsi Gorontalo dari tahun

2006 sampai 2014. Namun demikian angka ini masih dibawah angka tingkat pengangguran nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa pengangguran masih berada pada kondisi yang tidak parah. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan kenaikan dari tahun ketahun menyebabkan terbukanya kesempatan kerja baik disektor formal maupun informal di Provinsi Gorontalo.

Berikut ini ringkasan tabel penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

NO	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
1.	Pengaruh Pdrb, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Aceh	Nasir (2014)	Model analisis yang digunakan dalam menganalisa data adalah regresi berganda.	Variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada tingkat kepercayaan 95 persen. Artinya jika pengangguran naik maka jumlah penduduk miskin akan naik.
2.	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Utara	Arfan poyoh, Gene H. M. Kapantow, dan Juliana R. Mandei (2017)	Metode analisis regresi liner berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS)	Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, dari ketiga faktor yakni tingkat upah, inflasi dan pertumbuhan PDRB, yang berpengaruh nyata terhadap tingkat

				pengangguran di provinsi Sulawesi Utara adalah faktor tingkat upah, sedangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh nyata.
3.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan	Adit Agus Prastyo (2010)	Menggunakan metode analisis panel data (pooled data)	Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa besarnya nilai R^2 cukup tinggi yaitu 0,982677.
4.	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kota samarinda	Dahma Amar Ramdhan, Djoko Setyadi, dan Adi Wijaya (2017)	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kota Samarinda masih rendah karena pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat pengangguran di Kota Samarinda.

5.	Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo	Moh. Arif Novriansyah (2018)	Metode analisis kualitatif dan kuantitatif	Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo cukup berfluktuasi di Provinsi Gorontalo dari tahun 2006 sampai 2014. Namun demikian angka ini masih dibawah angka tingkat pengangguran nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa pengangguran masih berada pada kondisi yang tidak parah. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan kenaikan dari tahun ketahun menyebabkan terbukanya kesempatan kerja baik disektor formal maupun informal di Provinsi Gorontalo.
----	---	------------------------------	--	---

2.5 Keterkaitan Antar Variabel

2.5.1 Pengaruh Pendidikan Pesantren Terhadap Kemiskinan

Pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan daerah dilihat dari aspek sumber daya manusia. Oleh karena itu pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara

formal maupun non-formal. Fokus pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang merupakan kelanjutan dari Program Wajib Belajar 6 Tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk di masa mendatang.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Sebenarnya, ada banyak potensi dan manfaat yang dapat kita rasakan dengan berdirinya suatu pesantren. Selama ini, sebagian besar orang hanya melihat potensi pesantren dalam bidang pendidikan agama, pendidikan sosial dan politik. Padahal pesantren

memiliki potensi dalam bidang kesehatan, pengembangan teknologi, pemulihan lingkungan hidup dan bidang yang paling utama adalah pemberdayaan perekonomian bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa fungsi pesantren yaitu sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*center of excellence*), mencetak sumber daya manusia (*human resource*) dan juga melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*) (Nadzir, 2015).

Potensi pemberdayaan ekonomi pesantren bisa lebih dikembangkan untuk memajukan perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini akan berdampak pada pengurangan kemiskinan umat. Apabila model pemberdayaan ekonomi pesantren dikembangkan dan dijalankan secara luas dalam suatu wilayah, misalnya kota atau provinsi, maka hal ini akan mengurangi jumlah kemiskinan di wilayah tersebut. Pada akhirnya, kesejahteraan di daerah tersebut akan meningkat.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masadepan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa.

Secara umum, kemiskinan akan menghalangi seseorang untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Jika investasi pendidikan dilakukan, maka akan mampu meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Menurut Simmons, dalam Todaro (1994), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan universitas. Sehingga tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan.

Ada dua alasan mengapa pesantren bisa menjadi pelopor perekonomian umat. Pertama, santri adalah golongan masyarakat yang berkomitmen tinggi dengan agamanya. Komitmen para santri dalam agamanya dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan para santri. Kedua, fokus kegiatan pesantren pada kajian-kajian keislaman dapat membuatnya menjadi penggerak ekonomi syariah di masyarakat sekaligus melahirkan entrepreneur muda yang berjiwa islami (Muttaqin, 2011).

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kesejahteraan masyarakat khususnya Aceh. Pemerintah dapat

memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan merancang program-program yang berhubungan dengan pendidikan sedemikian rupa sehingga golongan miskin juga dapat ikut menikmatinya, karena hal ini juga dapat menurunkan ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Apabila pemerintah kurang mendukung pendidikan dan pelatihan, maka hanya sedikit dari penduduk yang berpendapatan rendah yang mendapat kesempatan untuk meningkatkan pendapatan, atau dengan kata lain meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

Menurut Gillis (2000) Terdapat dua alasan mengapa pendidikan itu penting: 1. Terdapat banyak permintaan yang tinggi untuk pendidikan, hal ini terjadi karena masyarakat dimana saja percaya bahwa pendidikan dapat memberikan keuntungan bagi diri mereka dan juga anak-anak mereka. Namun di negara-negara berkembang masih banyak yang belum dapat menampung permintaan pendidikan, karena belum banyak terdapat sekolah terutama di pedesaan dan daerah-daerah terpencil lainnya, sehingga masih banyak terdapat penduduk yang belum dapat mengenyam pendidikan. 2. Alasan lainnya adalah karena telah banyak dilakukan observasi yang menyebutkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka pendapatan dan kedudukan sosial seseorang di masyarakat akan dapat terangkat. Walaupun tidak semua orang yang menyelesaikan sekolahnya lebih baik dari yang tidak bersekolah atau menyelesaikan sekolahnya, namun rata-rata mereka yang menyelesaikan sekolahnya menghasilkan pendapatan lebih banyak.

Dengan demikian, seperti yang telah dijelaskan diatas pendidikan akan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung dengan meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik, dan membuka jalur hubungan vertikal bagi anak-anak mereka. Secara tidak langsung, pendidikan memberikan kemampuan yang lebih bagi golongan miskin untuk memperoleh bagian mereka dari total pendapatan.

Oleh karena itu orang-orang di seluruh dunia menyadari hal itu sehingga mereka berusaha agar anak-anak mereka nanti mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pada negara-negara berkembang kini mulai memperhatikan pentingnya pendidikan karena pendidikan dianggap dapat meningkatkan pembangunan (Puruwita, 2012).

2.5.2 Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika rumah tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka pengangguran akan secara langsung mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan (income poverty rate) maupun kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi (consumption poverty rate). Jika rumah tangga tersebut tidak menghadapi batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan

kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Hoover & Wallace (2003), menemukan bahwa tingkat kemiskinan sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi, dimana peningkatan pengangguran menyebabkan peningkatan kemiskinan. Lopez (2005), dalam penelitiannya berpendapat bahwa tidak seorang pun menyangsikan pentingnya pertumbuhan untuk mengurangi kemiskinan, namun demikian banyak penelitian yang juga menunjukkan bahwa kebijakan pro pertumbuhan (pro-growth) justru menghasilkan ketimpangan, bertentangan dengan tujuan pertumbuhan itu sendiri.

Jumlah pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pendapatan atau upah yang diperoleh pada saat itu. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Artinya, semakin tinggi pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan. Hal serupa dikemukakan oleh Sukirno yang mengatakan efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin rendah kesejahteraan masyarakat akibat menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu daerah, maka semakin tinggi

pula tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Pengaruh tingkat pengangguran yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh sesuai dengan teori di atas, dimana tingkat kemiskinan di Aceh secara persentase cenderung mengalami penurunan dikarenakan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan kegiatan perekonomian di Aceh yang semakin membaik dan berkembang dari tahun ke tahun sehingga tingkat pengangguran semakin berkurang dan pada akhirnya tingkat kemiskinan juga berkurang.

Menurut Raper dalam Brotherhood (2002) pengangguran adalah penyebab kemiskinan terbesar dan perlu diberantas, tetapi hanya dapat diatasi salah satunya dengan cara menyediakan pekerjaan dan kesempatan kerja, daripada hanya sekedar himbuan atau slogan-slogan saja. Pengangguran bukan semata-mata hanya masalah bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan, melainkan masalah bagi kita semua. Jika masyarakat tidak memiliki dana untuk dibelanjakan, maka perusahaan tidak dapat menjual produknya, dan dampaknya akan mempengaruhi seluruh perekonomian. Langkah pertama untuk mengurangi pengangguran adalah dengan mengakui bahwa pengangguran bukanlah akibat seseorang yang malas, melainkan masalah struktural.

Menurut Brotherhood (2002) pemerintah mempunyai peran dalam menerapkan kebijakan yang sesuai. Jika pemerintah melakukan investasi dalam penyediaan lapangan kerja, hal ini tidak hanya akan menjaga stabilitas perekonomiannya, tetapi juga akan menciptakan banyak kesempatan bekerja. Untuk memperoleh

pekerjaan, setiap individu memerlukan skill yang dibutuhkan pekerjaan tersebut, maka akses terhadap pelatihan sangat penting.

Menurut Kuncoro (2006) ada tiga masalah pokok yang harus diperhatikan yaitu tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangandalam berbagai bidang. Ketiga masalah pokok tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan antara satu dengan lainnya. Tingginya tingkat kemiskinan dikarenakan banyaknya pengangguran yang kemudian berdampak pada ketimpangan dalam berbagai bidang. Timbulnya kemiskinan dikarenakan rendahnya kemampuan masyarakat mengakses lapangan kerja dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Tingkat pengangguran akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh. Yang berarti apabila tingkat pengangguran meningkat sebesar satu (1%) persen saja maka akan menyebabkan jumlah penduduk miskin di aceh akan naik sebesar 51.026 persen. Hasil yang ditemukan sesuai dengan pendapat Sukirno (2004), yang menyatakan bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial ke pada yang mengalaminya (Nasir, 2014).

2.6 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

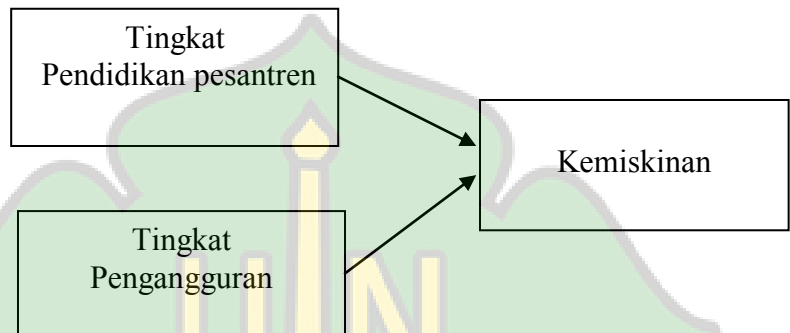
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi manusia itu sendiri akan memberi dampak dan akibat terhadap kehidupan manusia. Kemiskinan yaitu suatu masalah yang dapat terjadi pada kehidupan nyata dan akan merasakan dampak dan akibat dari kemiskinan tersebut. Faktor-faktor seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pendidikan dan kemiskinan satu sama lain saling terkait dimana kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam perkembangan kebijakan sosial (Aristina, 2017).

Faktor penyebab kemiskinan secara umum dibedakan menjadi dua yaitu faktor eksogen dan endogen. Faktor eksogen (faktor yang berada di luar individu tersebut) dibedakan menjadi faktor alamiah (keadaan alam, iklim, dan bencana alam) dan faktor buatan atau struktur (kolonialisme, sifat pemerintahan, sistem ekonomi dan sebagainya). Sedangkan faktor endogen (faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri) misalnya sifat menyerah pada nasib (fatalis), malas, boros, dan sebagainya (Arianti, 2016).

2.7 Kerangka Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, tingkat pendidikan pesantren dan tingkat pengangguran yang digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan di Aceh. Adanya keterkaitan antara tingkat dan tingkat pengangguran yang telah dijelaskan secara teoritis, tetapi juga diperkuat dengan hasil penelitian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sebelumnya peneliti Hoover & Wallace (2003) juga

menemukan dan menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi, dimana peningkatan pengangguran menyebabkan peningkatan kemiskinan. Oleh karena itu kerangka penelitian dapat digambarkan dalam gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban (dugaan) sementara terhadap rumusan masalah penelitian oleh karena itu jawaban yang diberikan masih berdasarkan pada teori yang relevan dan belum berdasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (sugiyono, 2005). Berdasarkan latar belakang penelitian, temuan penelitian terkait dan kerangka penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka menjadi hipotesis penelitian ini adalah :

$H0_1$: Variabel tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.

Ha_1 : Variabel berpengaruh terhadap kemiskinan.

$H0_2$: Variabel Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.

Ha₂ : Variabel Pengangguran berpengaruh terhadap Kemiskinan.

H₀₃ : Variabel dan Pengangguran tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemiskinan.

Ha₃ : Variabel Pendidikan Pesantren dan Pengangguran berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemiskinan.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Batasan Variabel

Dalam penelitian ini, variabel penjelas bagi kemiskinan hanya dibatasi pada tingkat pendidikan pesantren dan pengangguran. Kemiskinan yang dimaksudkan yaitu pada provinsi Aceh untuk mengetahui pengaruh pendidikan pesantren dan pengangguran terhadap kemiskinan di Aceh. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus, bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan karena hingga kini kemiskinan belum bisa dientaskan.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data numerik atau angka yang diperoleh dengan metode statistik serta dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh korelasi hubungan antara variable penelitian.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berbentuk data panel yang terdiri dari 23 kabupaten/kota di Aceh selama periode 2008-2019. Data-data tersebut berasal dari data BPS Aceh, dan instansi terkait lainnya

yang menyediakan data penelitian yang berkaitan dengan pendidikan pesantren, pengangguran, dan kemiskinan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012: 137). Data sekunder yang digunakan berbentuk data panel yaitu gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data dalam penelitian ini selama periode tahun 2008-2019 ($n = 12$) dan data yang diambil dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Data-data tersebut bersumber dari laporan BPS Aceh.

3.4 Teknik Analisis Data

Variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pendidikan pesantren, pengangguran, dan kemiskinan. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel. Data panel adalah kombinasi dari data *cross section* dan data *time series* (Baltagi, 2005). Model regresi panel yang diaplikasikan untuk memprediksi tingkat kemiskinan dengan menggunakan dua *predictor variable* tersebut diformulasikan dalam persamaan (1).

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 TPP_{it} + \beta_2 TP_{it} + e_{it}$$

Dimana β_0 : Konstanta; TK_{it} : Tingkat Kemiskinan di provinsi i pada tahun t ; TPP_{it} ; Tingkat Pendidikan Pesantren di provinsi i pada tahun t ; TP_{it} :Tingkat Pengangguran di provnsi i pada tahun t ;

β_1 dan β_2 : Koefisien regresi TP_{it} dan TP_{it} ; i :Provinsi; t : Tahun;
e:Error term.

Mengingat masing-masing variable memiliki pengukuran berbeda, maka data pada setiap variable ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, sehingga persamaan 1 tersebut modifikasi menjadi persamaan (2).

$$\text{LogTK}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogTP}_{it} + \beta_2 \text{LogTP}_{it} + e_{it}$$

Dimana : β_0 : Konstanta; LogTK_{it} : Logaritma Tingkat Kemiskinan di provinsi i pada tahun t ; LogTP_{it} : Tingkat Pendidikan Pesantren di provinsi i pada tahun t ; LogTP_{it} : Tingkat Pengangguran di provinsi i pada tahun t ; β_1 dan β_2 : Koefisien regresi TP_{it} dan TP_{it} ; i : Provinsi; t : Tahun; e : Error term.

Regresi panel memiliki tiga pendekatan yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Untuk menentukan mana di antara tiga pendekatan tersebut yang dinilai paling akurat untuk memprediksi pengaruh tingkat pendidikan pesantren dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan, digunakan *Chow test* dan *Hausman test*. *Chow test* digunakan untuk menentukan mana diantara dua metode (*common effect model* dan *fixed effect model*) yang dinilai lebih baik. Sedangkan *Hausman test* digunakan untuk memutuskan apakah model regresi yang digunakan *fixed effect* atau *random effect model*.

3.5 Metode Analisi Data

Dalam suatu penelitian jenis data dan hipotesis sangat menentukan dalam ketepatan pemilihan statistik alat uji. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Melakukan pemilihan estimasi dengan melakukan pengujian *Chow-test* dan *Housman-test*.
2. Melakukan uji lolos kendala linear atau yang sering disebut dengan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk melihat apakah model regresi panel layak atau tidak digunakan dalam penelitian ini.
3. Melakukan uji hipotesis yaitu analisis regresi panel, yang harus memenuhi kriteria yaitu uji F-test dan uji T-test.

3.5.1 Penentuan Model Estimasi

Penelitian yang menggunakan jenis data panel memiliki tiga jenis model regresi yang berbeda, yaitu:

1. *common effect model* atau *Pooled Least Square* merupakan pendekatan yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini dikarenakan model *common effect* tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu karena pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar individu dan kurun waktu sama. Metode ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Dapat dikatakan model ini merupakan model yang

sederhana dibandingkan dengan dua model lainnya yaitu *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

2. *fixed effect model* atau *Least Square Dummy Variabel* maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu, demikian pula dengan koefisien regresornya.
3. *random effect model* ini adalah mengatasi kelemahan dari model *fixed effect*. Model ini dikenal juga dengan sebutan model *generalized least square* (GLS). Model *random effect* menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek.

Sedangkan penentuan model estimasi dapat dilakukan dengan uji yang berbeda yaitu *Chow-test* dan *Housman-test* yang mana masing-masing uji tersebut membantu untuk memilih diantara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Model manakah yang sebaiknya digunakan:

1. *Chow-test*

Uji *Chow* disebut juga sebagai uji *Redudant Fix Effect* atau *Likelihood Ration*. Uji ini dilakukan untuk menentukan diantara *Common Effect Model* dan *Fix Effect*, model terbaik manakah yang dapat digunakan. Hipotesis dari uji *Chow* adalah jika H_0 diterima maka model yang dipilih adalah *Common Effect* sebaliknya jika H_a yang diterima dan H_0 ditolak maka model yang dipilih atau model yang terbaik untuk digunakan adalah *Fix effect Model*. Apabila *p-value* lebih kecil dari nilai signifikan ($p > \alpha$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima sebaliknya jika *p-value* lebih besar dari nilai signifikan

($p > \alpha$) maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Jika hasil dari *uji Chow* menemukan bahwa model yang sebaliknya digunakan adalah model *Common Effect* maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji *Lagrange Multiplier* sebaiknya jika hasil *Fix Effect Model* maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji *Hausman*.

2. *Housman-test*

Uji *Housman* dilakukan untuk menentukan diantara *Fix Effect Model* dan *Random Effect Model* manakah yang lebih baik untuk digunakan. Hipotesis dari uji *Housman* adalah jika H_0 diterima maka model yang dipilih adalah *Random Effect* sebaliknya jika H_a yang diterima dan H_0 yang diterima maka model yang pilih atau model yang terbaik digunakan adalah *Fix Effect Model*. Apabila *p-value* lebih kecil dari nilai signifikan ($p < \alpha$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima sebaliknya jika *p-value* lebih besar dari nilai signifikan ($p > \alpha$) maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Jika hasil dari uji *Housman* adalah *Fix Effect Model* maka tidak perlu dilanjutkan dengan uji *Lagrange multiplier* namun, sebaliknya jika hasilnya adalah *Random Effect* maka dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier*.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa syarat sebelum melakukan regresi yang harus dilalui yaitu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Model regresi harus bebas dari asumsi klasik yaitu, multikolinearitas bebas dari gejala autokorelasi, heteroskedastisitas dan uji normalitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka uji F dan uji t menjadi titik valid. Untuk menguji normalitas, penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bara, kriteria penilaian uji ini adalah jika signifikan hasil perhitungan data (Sig) > 5%, maka data berdistribusi normal, sedangkan jika signifikan hasil perhitungan data (Sig) < 5%, maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2011: 31) menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

- 1) Apabila *tolerance value* > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi.

2) Apabila *tolerance value* $< 0,1$ dan $VIF > 10$, maka dapat disimpulkan terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya. Uji Heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi maka model regresi dinyatakan tidak valid.

d. Uji Autokorelasi

Yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi dapat menggunakan uji residual pada e -views versi 10 dengan melihat *correlogram* dari Q -stat pada model. Jika terdapat p -value yang signifikan $< 0,1$ maka terdapat autokorelasi.

3.5.3 Penguji Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau (dugaan) sementara terhadap rumusan masalah penelitian oleh karena itu jawaban yang diberikan masih berdasarkan pada teori yang relevan dan belum berdasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2005). Pada keyakinan 95% hipotesis

penelitian penelitian dijabarkan menjadi hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternative (H_a) sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendidikan Pesantren terhadap Kemiskinan.

H_{01} : Variabel Pendidikan Pesantren tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.

H_{a1} : Variabel Pendidikan Pesantren berpengaruh terhadap kemiskinan.

2. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan.

H_{02} : Variabel Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.

H_{a2} : Variabel Pengangguran berpengaruh terhadap Kemiskinan.

3. Pengaruh Pendidikan Pesantren dan Pengangguran terhadap Kemiskinan.

H_{03} : Variabel Pendidikan Pesantren dan Pengangguran tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemiskinan.

H_{a3} : Variabel Pendidikan Pesantren dan Pengangguran berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemiskinan.

3.5.4 Pengujian Hipotesis secara Parsial (T)

Uji statistik t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap dependen, dengan ketentuan apabila nilai t dihitung suatu variabel lebih besar bila dibandingkan dengan nilai t table ($p\text{-value} < 0,05$) berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap dependen. Sebaliknya

apabila nilai t hitung suatu variabel lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai t table ($p\text{-value} > 0,05$) berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap dependen.

3.5.5 Pengujian Hipotesis secara Simultan (F)

Uji statistik F (simultan) digunakan untuk menguji tingkat signifikansi dari pengaruh Pendidikan Pesantren dan Pengangguran terhadap Kemiskinan dengan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai F hitung $>$ F tabel atau nilai $p\text{-value} < 0,05$ dapat diartikan bahwa Pendidikan Pesantren dan pengangguran signifikan terhadap Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima.
- b. Apabila nilai F hitung $<$ F tabel atau nilai $p\text{-value} > 0,05$ dapat diartikan bahwa pendidikan pesantren dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak.

3.5.6 Pengujian Granger Causality Test

Granger adalah nama ahli ekonometrika, dia salah seorang yang menginisiasi analisis kausalitas (sebab-akibat) antar variabel. Sehingga uji kausalitas ini sering disebut dengan Granger causality test. Kausalitas antara dua variabel terjadi ketika nilai prediksi suatu variabel meningkat ketika menggunakan nilai masa lalu variabel lainnya sebagai preditor variable. Variabel X dikatakan Granger-causes terhadap variabel Y, jika prediksi nilai Y

meningkat ketika menggunakan nilai masa lalu X. Demikian pula sebaliknya, variabel Y dikatakan Granger-causes terhadap variabel X ketika prediksi nilai X meningkat ketika menggunakan nilai masa lalu Y sebagai predictor variable. Karena itu, Granger causalitas akan menghasilkan tiga kemungkinan terdiri dari kausalitas satu arah (unidirectional causality), kausalitas dua arah (bidirectional causality) dan tidak ada kausalitas sama sekali. Dalam kemungkinan ketiga, predik nilai suatu variabel tidak secara nyata disebabkan oleh nilai masa lalu variabel lainnya.

3.6 Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan konsep yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Setelah menspesifikasi variabel-variabel penelitian maka akan dilakukan pendefinisian secara operasional. Hal ini bertujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan, sehingga memberikan petunjuk tentang bagian suatu variabel dapat diukur. Operasional variable penelitian ini terdiri dari variable independen dan variable dependen. Masing-masing variable tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Variabel dependen adalah suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan yang terjadi di Aceh. Kemiskinan (Y) merupakan jumlah penduduk yang berada dibawah garis

kemiskinan di kabupaten/kota terlihat pada periode tertentu yang dihitung dengan satuan persentase.

2. Variabel Independen adalah suatu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (terikat), secara singkat bahwa variabel independen adalah variabel yang nilainya dapat memengaruhi variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendidikan pesantren dan pengangguran di aceh.

Pendidikan pesantren (X_1) merupakan santri yang belajar di pesantren di daerah tertentu pada periode tahun tertentu yang dihitung dengan satuan persentase.

Tingkat Pengangguran Terbuka (X_2) adalah perhitungan jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan yang dihitung dengan satuan persentase.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No	Jenis Variabel	Singkatan	Nama Variabel
1	Dependen	Y	Persentase Kemiskinan (%)
2	Independen	X_1	Tingkat Pendidikan Pesantren (% santri)
		X_2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistika Deskriptif

4.1.1 Tingkat Kemiskinan

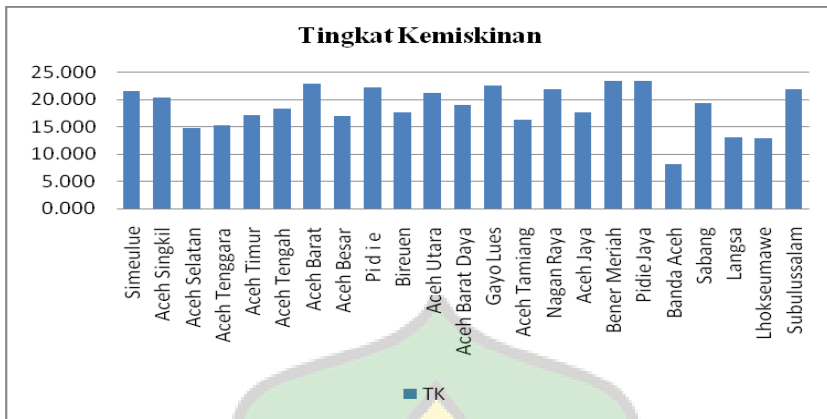
Tingkat kemiskinan, Pendidikan Pesantren (santri) dan Pengangguran pada tiap-tiap kabupaten/kota di provinsi Aceh relatif berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antar kabupaten/kota, tetapi juga pada daerah yang sama dalam periode waktu yang berbeda. Pada tahun 2019, daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi untuk 23 kabupaten di Aceh adalah di kabupaten Aceh Singkil (20,78%), kemudian menyusul Gayo Lues (19,87%) dan Pidie (18,46%). Sebaliknya, daerah dengan tingkat Kemiskinan terendah yaitu kota Banda Aceh (7,22%), kemudian menyusul kota Langsa (10,57%) dan Lhokseumawe (11,18%). Untuk melihat rata-rata persentase tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh 2017-2019

No	kabupaten/kota	Persentase (%)		
		2017	2018	2019
-1	-2	-3	-4	-5
1	Simeulue	20.20	19.78	18.99
2	Aceh Singkil	22.11	21.25	20.78
3	Aceh Selatan	14.07	14.01	13.09
4	Aceh Tenggara	14.86	14.29	13.43
5	Aceh Timur	15.25	14.49	14.47
6	Aceh Tengah	16.84	15.58	15.50
7	Aceh Barat	20.28	19.31	18.79

8	Aceh Besar	15.41	14.47	13.92
9	Pidie	21.43	20.47	19.46
10	Bireuen	15.87	14.31	13.56
11	Aceh Utara	19.78	18.27	17.39
12	Aceh Barat Daya	18.31	17.10	16.26
13	Gayo Lues	21.97	20.70	19.87
14	Aceh Tamiang	14.69	14.21	13.38
15	Nagan Raya	19.34	18.97	17.97
16	Aceh Jaya	14.85	14.16	13.36
17	Bener Meriah	21.14	20.13	19.30
18	Pidie Jaya	21.82	20.17	19.31
19	Banda Aceh	7.44	7.25	7.22
20	Sabang	17.66	16.31	15.60
21	Langsa	11.24	10.79	10.57
22	Lhokseumawe	12.32	11.81	11.18
23	Subulussalam	19.71	18.51	17.95

Berdasarkan nilai rata-rata tingkat kemiskinan dari tahun 2008 sampai 2019 yang memiliki persentase tingkat kemiskinan tertinggi yaitu kabupaten Pidie Jaya dan tingkat kemiskinan terendah yaitu kota Banda Aceh, untuk melihat rata-rata persentase tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini:



Sumber: BPS Dalam Angka 2008-2019

Gambar 4. 1 Rata-rata Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten Prov Aceh 2008-2019

Gambar 4.1 dapat kita lihat bahwa secara rata-rata menunjukkan Kabupaten Pidie Jaya menduduki pada peringkat pertama kemiskinan dengan nilai 23,537%, yang kemudian pada peringkat kedua disusul oleh kabupaten bener meriah dengan persentase nilai sebesar 23,458%. Sebaliknya, seperti yang terlihat pada gambar diatas menunjukkan bahwasanya kota Banda Aceh menunjukkan tingkat kemiskinan terendah di provinsi Aceh dengan nilai 8,164%.

4.1.2 Pendidikan Pesantren

Provinsi Aceh secara geografis memiliki 23 Kabupaten/Kota dengan karakteristik dan budaya yang berbeda-beda, akan tetapi secara umum pandangan orang luar yang berdasarkan sejarah provinsi Aceh dijuluki sebagai serambi mekkah yang identik dengan budaya islaminya, dengan demikian berdasarkan budaya dan kebiasaan rohani masyarakatnya, Aceh

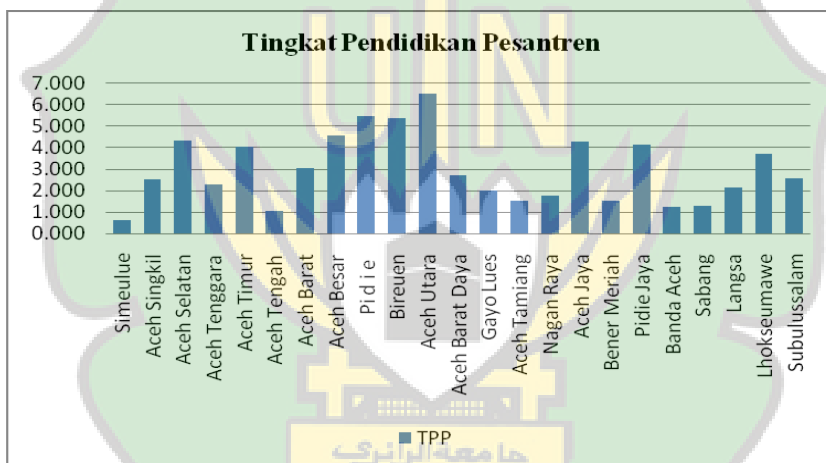
memiliki banyak instansi pendidikan terutama pesantren. Pendidikan pesantren di Aceh dengan data terbaru pada tahun 2019, daerah dengan tingkat pendidikan pesantren yaitu santri yang tertinggi adalah kabupaten Bireuen (11,00%), kemudian disusul kabupaten Pidie Jaya (6,03%) dan Aceh Besar (4,98%). Sebaliknya, daerah dengan tingkat Santri terendah yaitu Simeulu (0,779%), kemudian menyusul Aceh Tengah (0,728%) dan Banda Aceh (1,152%). Dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2 Persentase Santri Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2017-2019

No	kabupaten/kota	Persentase (%)		
		2017	2018	2019
-1	-2	-3	-4	-5
1	Simeulue	0.589	0.567	0.779
2	Aceh Singkil	2.344	2.329	2.010
3	Aceh Selatan	3.328	5.402	3.195
4	Aceh Tenggara	2.042	2.726	2.373
5	Aceh Timur	2.613	2.564	1.864
6	Aceh Tengah	1.439	1.258	0.728
7	Aceh Barat	1.756	1.684	2.526
8	Aceh Besar	5.595	6.034	4.988
9	Pi d i e	1.471	1.063	2.304
10	Bireuen	4.573	5.703	11.004
11	Aceh Utara	5.440	5.361	4.867
12	Aceh Barat Daya	2.901	2.854	3.057
13	Gayo Lues	0.893	2.255	1.384
14	Aceh Tamiang	1.823	2.142	1.225
15	Nagan Raya	0.846	0.830	1.749
16	Aceh Jaya	4.097	4.344	4.489
17	Bener Meriah	1.975	1.799	2.240
18	Pidie Jaya	4.492	4.171	6.035
19	Banda Aceh	1.591	1.517	1.152

20	Sabang	0.877	1.487	1.348
21	Langsa	1.391	2.168	2.267
22	Lhokseumawe	1.695	4.252	2.911
23	Subulussalam	3.671	3.644	2.541

Berdasarkan nilai rata-rata tingkat Pendidikan Pesantren dari tahun 2008 sampai 2019 yang memiliki persentase santri tertinggi yaitu kabupaten Pidie dan persentase santri terendah yaitu kabupaten Simeulu, untuk melihat rata-rata persentase tingkat pendidikan pesantren Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini:



Sumber: BPS Dalam Angka 2008-2019

Gambar 4. 2 Rata-rata Tingkat Pendidikan Pesantren Menurut Kabupaten Prov Aceh 2008-2019

Gambar 4.2 dapat kita lihat bahwa secara rata-rata menunjukkan Kabupaten Aceh Utara menduduki pada peringkat tertinggi dengan persentase jumlah santri sebesar 6.524%, yang kemudian pada peringkat kedua disusul oleh kabupaten Pidie dengan persentase nilai sebesar 5.494%. Sebaliknya, seperti yang

terlihat pada gambar diatas menunjukkan bahwasanya kabupaten Simeulue menunjukkan tingkat kemiskinan terendah di provinsi Aceh dengan nilai 0,637%.

4.1.3 Tingkat Pengangguran

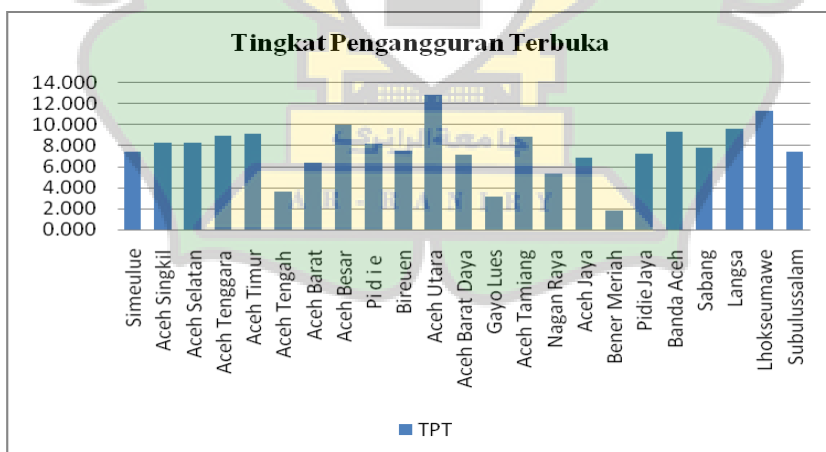
Tingkat Pengangguran di Aceh dalam 23 kabupaten, pada tahun 2019 daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi yaitu kota Lhokseumawe (11,06%), kemudian menyusul (8,63%) dan pada urutan ketiga kabupaten Aceh Singkil (8,60%). Sebaliknya, daerah dengan tingkat Pengangguran terbuka terendah yaitu Bener Meriah (1,02%), kemudian menyusul Gayo Lues (1,74%) dan Aceh Tengah (2,65%). Dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4. 3 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2017-2019

No	kabupaten/kota	Persentase (%)		
		2017	2018	2019
-1	-2	-3	-4	-5
1	Simeulue	3,12	4,94	5,87
2	Aceh Singkil	7,14	8,04	8,60
3	Aceh Selatan	7,24	6,08	6,58
4	Aceh Tenggara	4,75	3,76	3,46
5	Aceh Timur	8,42	6,93	7,64
6	Aceh Tengah	3,91	2,13	2,65
7	Aceh Barat	6,20	8,67	7,45
8	Aceh Besar	8,49	7,30	7,75
9	Pi d i e	7,64	7,23	6,89
10	Bireuen	4,50	3,52	3,88
11	Aceh Utara	11,02	10,18	8,63
12	Aceh Barat Daya	3,16	3,95	4,30

13	Gayo Lues	1,71	2,52	1,74
14	Aceh Tamiang	5,43	6,25	6,07
15	Nagan Raya	4,11	5,94	5,35
16	Aceh Jaya	6,23	4,95	4,19
17	Bener Meriah	1,06	1,07	1,02
18	Pidie Jaya	4,89	5,02	4,36
19	Banda Aceh	7,75	7,29	6,92
20	Sabang	3,00	4,21	4,60
21	Langsa	7,03	7,12	7,70
22	Lhokseumawe	10,51	12,52	11,06
23	Subulussalam	4,91	6,49	7,25

Berdasarkan nilai rata-rata tingkat Pengangguran dari tahun 2008 sampai 2019 yang memiliki persentase pengangguran tertinggi yaitu kabupaten Aceh Utara dan tingkat pengangguran terendah yaitu kabupaten Bener Meriah, untuk melihat rata-rata persentase tingkat pendidikan pesantren Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini:



Sumber: BPS Dalam Angka 2008-2019

**Gambar 4. 3 Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Kabupaten Prov Aceh 2008-2019**

Gambar 4.3 dapat kita lihat bahwa secara rata-rata menunjukkan Kabupaten Aceh Utara menduduki pada peringkat tertinggi tingkat pengangguran dengan persentase sebesar 12.872%, yang kemudian pada peringkat kedua disusul oleh kabupaten Pidie dengan persentase nilai sebesar 11.298%. Sebaliknya, seperti yang terlihat pada gambar diatas menunjukkan bahwasanya kabupaten Bener Meriah menunjukkan tingkat pengangguran terendah di provinsi Aceh dengan persentase sebesar 1.786%.

4.2 Hasil Statistik Deskriptif dan Korelasi Antar Variabel

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang dilihat dari nilai mean, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Widarjono, 2013). Teknik deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yang terdiri dari tingkat kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran selama periode tahun 2008-2019. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil statistik deskriptif dan korelasi antar variabel dapat dilihat pada Table 4.4:

Tabel 4. 4 Hasil statistik deskriptif dan korelasi antar variabel

Statistik Deskriptif			
	TK	TPP	TPT
	(Persen)	(Persen)	(Persen)
Mean	18,648	2,987	7,665
Median	18,949	2,337	7,545
Maximum	30,260	18,381	17,970
Minimum	7,219	0,122	0.370

Korelasi Antar Variabel			
TK	1	0,121	-0,202
TPP	0,121	1	0,198
TPT	-0,201	0,198	1

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Table 4.4 di atas memperlihatkan empat ukuran statistik yang menginformasikan hitungan kuantitatif ketiga variabel yang terdiri dari mean, median, maximum, dan minimum. Rata-rata (*mean*) data panel tingkat kemiskinan, pendidikan pesantren dan pengangguran 23 kabupaten/kota di Aceh dengan *time series data* selama periode 2008-2019 menunjukkan nilai kemiskinan 18,648%, tingkat pendidikan pesantren 2,987%, dan tingkat pengangguran terbuka 7,665%. Nilai (*median*) untuk kemiskinan sebesar 18,949%, pendidikan pesantren 2,337%, dan pengangguran 7,545%. Nilai paling tinggi (*maximum*) untuk tingkat kemiskinan yaitu 30,260%, pendidikan pesantren 18,387%, dan pengangguran 17,970%. Selanjutnya nilai paling rendah (*minimum*) tingkat pendidikan pesantren sebesar 7,219%, pendidikan pesantren 0,122%, dan pengangguran 0,370%.

Korelasi antar variabel memperlihatkan arah hubungan antara tiga variabel. Tingkat kemiskinan berhubungan positif dengan pendidikan pesantren (santri) yang menunjukkan nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,121 dan tingkat kemiskinan berhubungan negatif dengan pengangguran, hal tersebut dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar -0,201. Hal tersebut mengindikasikan adanya hubungan searah antara

kemiskinan dengan pendidikan pesantren (santri). Semakin tinggi tingkat pendidikan pesantren (santri) maka semakin tinggi tingkat kemiskinan. Dengan tingkat pendidikan pesantren meningkat sedangkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia masih kurang, maka akan menyebabkan pengangguran tinggi dan akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang tinggi. Sedangkan dengan tingkat pengangguran maka dapat mengindikasikan adanya hubungan tidak searah atau berlawanan antara kemiskinan dengan tingkat pengangguran. Menurut penulis, hal ini terjadi karena dari hasil korelasi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran menunjukkan tanda negatif, dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Yudha (2013), tidak semua orang yang sementara menganggur itu selalu miskin. Karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka adalah beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara empat kategori pengangguran terbuka di atas bahwa sebagian di antaranya ada yang masuk dalam sektor informal dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari yang ditentukan.

Selain itu pastilah juga ada yang sedang berusaha atau mempersiapkan usaha sendiri, dengan begitu apabila usaha tersebut merekrut pekerja lain maka kemiskinan akan menurun, ada yang menunggu mulai bekerja, atau pekerja paruh waktu namun mempunyai penghasilan yang melebihi daripada orang yang bekerja secara normal dan yang mana semua golongan tersebut termasuk kedalam golongan pengangguran terbuka.

Kemiskinan mungkin tidak selalu berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan. Selain itu juga diperkuat dengan pendapat Arsyad (1997) yang menyatakan bahwa salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka.

Hubungan antara pendidikan pesantren (santri) dan pengangguran berpengaruh positif dengan koefisien korelasi sebesar 0,198. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan pesantren (santri) tidak secara langsung mengurangi pengangguran, karena disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan atau kurang sesuai bagi pencari kerja untuk mencari kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikannya sehingga menyebabkan menganggur.

4.2.1 Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, model analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan pesantren dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan adalah regresi panel. Model ekonometrika tersebut terdiri dari tiga pendekatan yakni *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Untuk menentukan mana di antara tiga pendekatan tersebut yang paling tepat digunakan sebagai alat estimasi, digunakan *Chow test* dan *Hausman test*. *Chow test* digunakan untuk menentukan apakah menggunakan model *common effect* atau *fixed effect*, sedangkan *Hausman test* digunakan untuk menentukan apakah menggunakan model *fixed effect* atau *random effect*. Uji *Chow test* untuk menentukan apakah model yang dipilih *common effect* atau *fixed effect* didasarkan pada nilai *p-value* untuk *cross-section F* dengan ketentuan jika *p-value* > 0.05, maka model adalah *common effect*. Sebaliknya jika *p-value* < 0.05 maka model yang dipilih adalah *fixed effect*. Hasil uji *Chow test* ditunjukkan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Hasil Chow test

Uji Efek		Statistic	d.f.	Prob.
Cross-Section	Cross-section F	30,889	-22,251	0,000
Fixed Effects	Cross-section Chi-square	361,657	22	0,000

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai *p-value cross section F* sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa berdasarkan *Chow test*, model yang dipilih adalah *fixed effect model*.

Selanjutnya uji *Hausman test* digunakan untuk menentukan apakah model yang dipilih *fixed effect* atau *random effect*. Pemilihan salah satu di antara kedua model tersebut didasarkan pada nilai *p-value cross-section random* dengan ketentuan jika nilai *p-value* > 0.05 maka model yang dipilih adalah *random effect*. Sebaliknya jika nilai *p-value* < 0.05 maka model yang dipilih adalah *fixed effect*. Hasil uji *Hausman test* seperti ditunjukkan dalam Table 4.6.

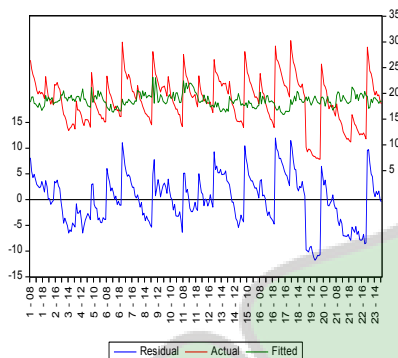
Tabel 4. 6 Hasil Hausman test

Uji Efek	X ² -Statistic	d.f	p-value
<i>Cross-section Random Effect</i>	20,217	2	0,000

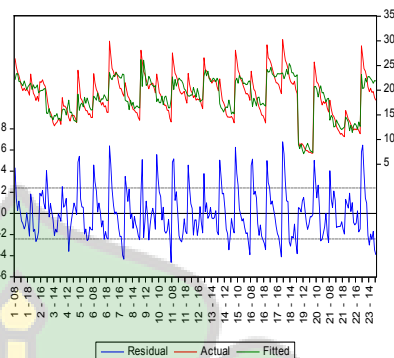
Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Table 4.6 memperlihatkan nilai X²-Statistik sebesar 20,217 dan nilai *p-value* sebesar 0,000. Nilai X²-tabel pada tingkat keyakinan 95% pada df=2 sebesar 5,991. Karena nilai X²-Statistik $>$ daripada X²-tabel ($20,217 > 5,991$), dan nilai *p-value* $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* lebih baik bila dibandingkan dengan *random effect model*. Sebelumnya hasil *Chow test* (Tabel 4.5) juga mengindikasikan bahwa model terbaik juga yaitu *fixed effect model*. Justifikasi statistik yang menyimpulkan bahwa *fixed effect model* dinilai lebih baik dibandingkan *random effect model* juga dapat didasarkan pada

perbandingan gambar residual yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.4 dan 4.5.



Gambar 4.4 *Residual metode random effect model*
Sumber: *Output Eviews, 2020*



Gambar 4.5 *Residual metode fixed effect* Sumber: *Output Eviews, 2020*

Gambar 4.4 memperlihatkan residual yang dihasilkan dari pendekatan *random effect model*. Pada gambar tersebut terlihat bahwa variasi/fluktuasi garis *actual* cenderung berbeda dengan fluktuasi garis *fitted*. Selanjutnya, Gambar 4.5 memperlihatkan residual regresi panel yang dihasilkan oleh pendekatan *fixed effect model*. Pada gambar tersebut terlihat bahwa variasi/fluktuasi garis *actual* hampir sama dengan fluktuasi garis *fitted*. Berdasarkan perbandingan garis *actual* dan garis *fitted* pada kedua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan *fixed effect model* menghasilkan estimasi yang lebih akurat bila dibandingkan dengan pendekatan *random effect model*. Karena itu, regresi panel yang dipilih dan kemudian digunakan untuk kepentingan analisis dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*.

Pengujian gejala multikolinieritas dalam model regresi panel dilakukan dengan membandingkan nilai *adjusted-R²* yang dihasilkan dari proses regresi dengan nilai koefisien korelasi (r) antara sesama *predictor variable*. *Predictor variable* dalam kajian ini adalah pendidikan pesantren dan pengangguran. Koefisien korelasi antar variabel seperti ditunjukkan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Koefisien Korelasi Antar Variabel

	LOGTK	LOGTPP	LOGTPT
LOGTK	1	0,079	-0,220
LOGTPP	0,079	1	0,273
LOGTPT	-0,220	0,273	1

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Tabel 4.7 menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) antara tingkat pendidikan pesantren (LOGTPP) menunjukkan angka positif sebesar 0,079, dan tingkat pengangguran terbuka (LOGTPT) menunjukkan angka negatif sebesar -0,220. Angka ini lebih kecil dari nilai *adjusted-R²* pada regresi panel sebesar 0,798. Hal ini berarti model regresi panel yang digunakan untuk memprediksi pengaruh pendidikan pesantren dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan tidak memiliki gejala multikolinieritas.

4.3 Analisis Regresi Data Panel

Pendidikan pesantren berpengaruh positif dan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari koefisien estimasi kedua variabel

independen tersebut bernilai positif seperti ditunjukkan dalam rangkuman hasil regresi panel dalam Tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Ringkasan Hasil Regresi Panel

<i>Dependent Variable: LOGTK</i>				
<i>Method: Panel Least Squares</i>				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2,633	0,042	61,408	0,000
LOGTPP	0,032	0,014	2,212	0,028
LOGTPT	0,121	0,021	5,694	0,000
R2= 0,816; adjusted-R2= 0,798; F-statistic = 46,337; Prob(F-test) = 0,000; Durbin-Watson test = 1,026; p-value > 0,05 tidak signifikan pada keyakinan 95%.				

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.8 maka hubungan fungsional antara tingkat kemiskinan dengan tingkat pendidikan pesantren dan tingkat pengangguran dapat dinyatakan dalam persamaan (3).

$$LTK_{it} = 2,633 + 0,033LTPP_{it} + 0,121LTPT_i$$

Pendidikan pesantren berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien estimasi sebesar 0,033 (p-value = 0,027 < 0,05). Secara statistik, angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan pendidikan pesantren sebesar 1% dapat menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,033%. Adanya dampak signifikan pendidikan pesantren terhadap kenaikan tingkat kemiskinan

disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga tidak dapat bekerja, mereka yang sedang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta hal tersebut juga dapat disebabkan pendidikan yang belum diikuti oleh tingkat keterampilan sehingga tidak produktif, dengan begitu akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Namun, bertolak belakang dengan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Hermanto (2008) diperoleh hasil bahwa pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini juga sesuai dengan teori pertumbuhan baru yang menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (Human Capital). Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Dengan meningkatnya produktivitas tersebut, akan mendorong meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan.

Tingkat pengangguran terbuka juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi sebesar 0,121 ($p\text{-value} = 0,000 < 0,05$). Secara statistik angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan pengangguran 1% maka tingkat kemiskinan akan

meningkat sebesar 0,121%. Adanya dampak signifikan pengangguran terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan disebabkan oleh kurangnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang mereka capai dan akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Semakin kurangnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan karena menganggur maka akan mengakibatkan terjebak dalam kemiskinan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Arsyad (2010) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Permana (2012) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh langsung dan signifikan berdampak pada kemiskinan. Pedoman yang digunakan sebagai acuan adalah pendapat dari Sukirno (2004) yang menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang.

Banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa sumber utama kemiskinan adalah pengangguran. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu daerah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

4.3.1 Granger Causality Test

Guna menganalisis arah hubungan kausalitas antara ketiga variabel digunakan panel *Granger causality test*. Dari hasil pengujian *Granger causality test* ditemukan bahwa terdapat kausalitas dua arah antara tingkat pendidikan pesantren dan tingkat pengangguran terbuka. Artinya, antara kedua variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Tingkat pendidikan pesantren mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terbuka juga mempengaruhi tingkat pendidikan pesantren. Dengan kata lain, terjadinya perubahan pendidikan pesantren di Aceh merupakan respons terhadap perubahan tingkat pengangguran di Aceh. Demikian pula halnya perubahan tingkat pengangguran merupakan respons terhadap perubahan tingkat pendidikan pesantren di Aceh.

Hanya saja, pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan terjadi pada lag 1. Ini mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran pada periode t , berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan periode berikutnya ($t+1$). Tingkat pengangguran secara langsung berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan. Hal inilah yang secara statistik dijelaskan oleh time lag 1 tersebut. Peningkatan pengangguran di daerah Aceh berarti semakin banyaknya jumlah masyarakat yang menganggur dan kurangnya kesejahteraan, maka akan terjadinya kemiskinan.

Selanjutnya pengaruh tingkat pendidikan pesantren terhadap tingkat kemiskinan terjadi pada lag 2. Ini berarti

peningkatan tingkat pendidikan pesantren pada periode t secara signifikan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan dua tahun kemudian ($t+2$). Adanya durasi waktu (time lag) pengaruh tingkat pendidikan pesantren terhadap kemiskinan disebabkan karena tingginya pengetahuan, akhlak dan ilmu yang didapatkan santri di pesantren akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan santri. Semakin tinggi tingkat pendidikan santri, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Lain halnya ketika pendidikan yang kurang dan kemampuan serta keahlian yang tidak terlihat maka akan menghambat produktivitas kerjanya. Hal inilah yang menyebabkan adanya durasi waktu yang relatif panjang dalam hubungan kausalitas antara pendidikan pesantren terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Adanya kausalitas dari pendidikan pesantren terhadap kemiskinan secara statistik mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pendidikan pesantren merupakan respons terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan pendidikan pesantren akan menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang, memindahkan ilmu pengetahuan, memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat, untuk memberantas kebodohan, menghilangkan salah pengertian, memberi bimbingan dalam hidup, menolong dalam menghadapi kesukaran, mensejahterakan penduduk dan menentramkan batin

sehingga secara langsung dapat berdampak pada bertambahnya kemampuan dan menerapkan etika yang sesuai dengan ajaran islam akan mendorong peningkatan produktivitas kerja yang lebih baik.

Adanya causalitas antar variabel dijelaskan dari tabel berikut ini:

Tabel 4. 9 Hasil Granger causality test

Variabel Endogen	Variabel Eksogen					
	Lag 1			Lag 2		
	LTK	LTPP	LTPT	LTK	LTPP	LTPT
LTK		[0,687]	[3,026]		[8,919]	[0,206]
		0,408	0,083*		0,000 **	0,814
LTPP	[0,005]		[3,193]	[1,813]		[1,596]
	0,941		0,075 *	0,166		0,204
LTPT	[1,750]	[0,205]		[1,044]	[2,558]	
	0,187	0,651		0,353	0,080 *	
	Lag 3			Lag 4		
	LTK	LTPP	LTPT	LTK	LTPP	LTPT
LTK		[4,281]	[2,283]		[3,130]	[1,758]
		0,005 **	0,080 *		0,016 **	0,139
LTPP	[0,473]		[0,532]	[1,603]		[1,339]
	0,702		0,660	0,175		0,257
LTPT	[1,922]	[1,283]		[1,881]	[2,089]	
	0,127	0,281		0,115	0,084 *	
Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)						
Angka dalam [] adalah nilai <i>F-statistic</i> , angka tanpa [] adalah nilai <i>p-value</i>						
*) signifikan pada keyakinan 90%						
**) signifikan pada keyakinan 95%						

Tabel 4.9 menginformasikan bahwa kausalitas dua arah terjadi antara tingkat pendidikan pesantren dan tingkat pengangguran terbuka pada lag 1 dan lag 2. Hal ini

mengindikasikan bahwa perubahan tingkat pendidikan pesantren merupakan respons terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ketika tingkat pendidikan pesantren tinggi, maka akan menurunkan tingkat pengangguran. Hal tersebut akan menyebabkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat menurunkan angka pengangguran sehingga memajukan perekonomian suatu Negara.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi data panel dan granger causality yang telah dilakukan mengenai Pendidikan Pesantren dan Tingkat pengangguran terhadap Kemiskinan di aceh. Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendidikan Pesantren dan pengangguran terhadap penurunan Kemiskinan di Aceh. Menggunakan data dari 23 kabupaten/kota selama periode 2008-2019, panel regresi metode fixed effect dan Granger causality test dioperasionalkan untuk menguji hubungan fungsional antar variabel tersebut. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Pesantren (TPP) dalam hasil regresi panel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Secara statistik, angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan pendidikan pesantren atau peningkatan santri sebesar 1% dapat menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0.033%. Hal tersebut dapat disebabkan karena pendidikan yang belum diikuti oleh tingkat keterampilan sehingga tidak produktif
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam hasil regresi panel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Secara statistik angka tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan pengangguran 1% maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0.121%.

3. Hasil Granger causality test mengindikasikan bahwa kausalitas dua arah terjadi antara tingkat pendidikan pesantren dan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan tingkat pendidikan pesantren merupakan respons terhadap tingkat pengangguran terbuka.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Dalam mengurangi angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi Aceh harus mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru guna menyerap tenaga kerja yang terus menerus tumbuh, sehingga dampak dari masalah pengangguran dapat diatasi atau dikurangi, karena tingkat pengangguran juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh.
2. Peningkatan kemiskinan di Aceh sangat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran dan regulasi dari pemerintah daerah maka dari itu dalam hal mengurangi angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi Aceh memiliki peran yang penting dalam membuat program-program yang pro terhadap pemberdayaan SDM yang ada, serta harus mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru guna menyerap tenaga kerja yang terus menerus tumbuh, sehingga

dampak dari masalah pengangguran dapat diatasi atau dikurangi.

3. Pemerintah harus mampu menciptakan program-program peningkatan kualifikasi dan mutu tenaga pendidik di Pesantren serta harus menjadi prioritas utama pembangunan dalam sektor mutu pendidikan pesantren di Aceh. Upaya ini harus dilakukan terutama untuk mengurangi kesenjangan tingkat dan mutu pendidikan pesantren antar kabupaten/kota di Aceh, sehingga semua penduduk Aceh akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan sekaligus meningkatkan mutunya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, F. J. (1998) *Azas-azas Pendidikan Islam*, Terj. Herry Noer Ali, Bandung, CV. Diponegoro.
- Adnan, A. Z. (2018). Strategi Mewujudkan Kemandirian Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al Bahjah Cirebon). *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(9).
- Agus Prastyo. A. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2003-2009*. Semarang; Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Amalia, A. (2017). *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Ketimpangan Gender Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara, At-Tawassuth*, 3(3), 324 – 344.
- Arianti, D., 5 Aliasuddin. (2016). *Profil Kemiskinan Di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*, 1(1), 29-37.
- Aristina, I. (2017). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali*, E-Jurnal EP Unud, 6(5), 677-704.
- Arsyad, L. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Penerbit STIE YKPN. Yogyakarta.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Azyumardi, Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd ed.). England: John Willey & Sons, Ltd.
- Brotherhood of St. Laurence, (2002). *Unemployment and Poverty*, Australia.
- Fawait, A. (2013). *Transformasi Pengembangan Tradisi Pondok Pesantren*. Edu-Islamika, 5(1), 93–122.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program IBMSPSS19*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gillis, & Malcom. (2000). *Economic of Development*, New York : WW Norton & Company Inc.
- Harlik., Amir. A., & Hardiani. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Jambi*, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 1 (2), 109-120.
- Hermanto, S & Dwi W. (2008). *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*.
- Hoover, G. A. dan Geoffrey L. Wallace. "Examining the Relationship between the Poverty Rate and Economic Conditions: A Comparison of the 1980s- 1990s". The University of Alabama. Economic, Finance and Legal Working Paper Series. Oktober 2003.

- Kesuma, G. C. (2017). Refleksi Model Pendidikan Pesantren dan Tantangannya Masa Kini. *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah* 02 (1) (2017) 67-79
- Kholis. N. (2014). *Pendidikan Islam Dalam Usaha Mengatasi Kemiskinan*. Jurnal Kependidikan, Vol. II No. 2.
- Kuncoro, Mudrajad. (2006). *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah Dan Kebijakan*. Yogyakarta :STIM YKPN
- Lope, H. (2005). *The Economic Impact of Armed Conflict in Rwanda*. *Journal of African Economies*, 14(4), 586-602.
- Majid. M. Shabri Abd. (2014). *Analisis Tingkat Pendidikan Dan Kemiskinan Di Aceh*. Jurnal Pencerahan Vol 8, Nomor 1.
- Maksum, A. (2015). *Model Pendidikan Toleransi di Pesantren Modern dan Salaf*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 82–108.
- Mubarak, Faisal. (2009). Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia. *Jurnal: Ta'lim Muta'allim*, Vol. 4, No. 8, ISSN 2088-2977-.
- Munawar dan Hafnani. (2015). *Prediksi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh dengan Model AR*. *Jurnal Gradien*. Vol.11 No.1.
- Muttaqin, R. (2011). *Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)*. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2).

- Muttaqin, R. (2011). Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2).
- Nadzir, M. (2015). Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 37–56.
- Nasikun. (2001). Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Diktat Kuliah Program Magister Administrasi Publik, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press. 2001.
- Nasir. (2014). Pengaruh Pdrb, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Aceh. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1 No. 1 : 59 – 64.
- Permana, Anggit Y., & Arianti F (2012). Analisi Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*. Vol 1 No 1 Tahun 2012.
- Poyoh. A. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Utara, Agri-SosioEkonomiUnsrat*, 13 (1A), 55 – 66.
- Ramdhan, D. A., Setyadi, D. DKK (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Samarinda, *INOVASI*, 13 (1), 1-18.

- Retnowati. D, dan Harsuti.(2016). *Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah*.Vol-6, no 1.
- Rika, D., Munawaroh., & Puruwita. D. (2012). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Dki Jakarta, EconoSains*, 8(2), 144-157
- Royat, Sujana. (2015). *Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Menko Kesra Bidang Koordinasi Pengangulan Kemiskinan. Jakarta.
- S., D. R., Munawaroh, M., & Puruwita, D. (2012). Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. *Jurnal ilmiah Ekonosains*, 10(2), 144-157.
- Samsul, Nizar, *Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001
- Samuelson dan W illiam D. nordhaus. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Edisi Ketujuh Belas. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Setyadi.S. (2017). *Pengaruh Inflasi, Upah Minimum Regional Dan Kesempatan Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur Terhadap Pengangguran Terdidik Di Provinsi Banten*. Jurnal Ekonomi-Qu, Volume 7 nomor 1, April 2017.
- Sidiq, U. (2013). *Pengembangan Standarisasi Pondok Pesantren*. Jurnal Pendidikan Islam, 7(1), 71–88.
- Soedjiarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: PT. Kompas
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alberta.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Makro Ekonomi Modern*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makroekonomi Teori pengantar*. Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, In'am, *Masa Depan Pesantren: Eksistensi Pesantren di Tengah Gelombang Modernisasi*, (Malang: Madani, 2010).
- Syam, Nur. *Kepemimpinan dalam Pengembangan Pondok Pesantren, Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2003). *Economic Development*. Boston: Addison Wesley.
- Todaro, Michael P, (2000), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Usa, Muslih, *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).
- Usman, M. I. (2013). Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangan Masa Kini). *Jurnal Al Hikmah*, XIV(1), 101–119.
- Wadi, Moh. (2018). *Potensi Dan Peran Pesantren Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat*. Surabaya

- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Terhadap Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal EKSOS*, 8(3), 176-185.
- Yudha. Ota. R.P. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2011*, Semarang.
- Yusuf, Qardhawi , 2005. *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Terj, Sari Narulita, Zikrul Hakim: Jakarta



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Kabupaten/Kota		Kemiskinan (%)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Simeulue	19.92	20.43	19.93	20.20	19.78	18.99
2.	Aceh Singkil	17.77	21.72	21.60	22.11	21.25	20.78
3.	Aceh Selatan	12.79	13.24	13.48	14.07	14.01	13.09
4.	Aceh Tenggara	13.75	14.91	14.46	14.86	14.29	13.43
5.	Aceh Timur	15.88	15.85	15.06	15.25	14.49	14.47
6.	Aceh Tengah	16.99	17.51	16.64	16.84	15.58	15.50
7.	Aceh Barat	22.97	21.46	20.38	20.28	19.31	18.79
8.	Aceh Besar	16.13	15.93	15.55	15.41	14.47	13.92
9.	Pidie	20.29	21.18	21.25	21.43	20.47	19.46
10.	Bireuen	16.94	16.94	15.95	15.87	14.31	13.56
11.	Aceh Utara	19.58	19.20	19.46	19.78	18.27	17.39
12.	Aceh Barat Daya	17.99	18.25	18.03	18.31	17.10	16.26
13.	Gayo Lues	21.43	21.95	21.86	21.97	20.70	19.87
14.	Aceh Tamiang	14.58	14.57	14.51	14.69	14.21	13.38
15.	Nagan Raya	20.85	20.13	19.25	19.34	18.97	17.97
16.	Aceh Jaya	16.52	15.93	15.01	14.85	14.16	13.36
17.	Bener Meriah	22.45	21.55	21.43	21.14	20.13	19.30

18.	Pidie Jaya	21.78	21.40	21.18	21.82	20.17	19.31
19.	Banda Aceh	7.78	7.72	7.41	7.44	7.25	7.22
20.	Sabang	17.02	17.69	17.33	17.66	16.31	15.60
21.	Langsa	12.08	11.62	11.09	11.24	10.79	10.57
22.	Lhokseumawe	11.93	12.16	11.98	12.32	11.81	11.18
23.	Subulussalam	19.72	20.39	19.57	19.71	18.51	17.95



Lampiran 2

Kabupaten/Kota		Santri (%)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Simeulue	0.284	0.279	0.580	0.589	0.567	0.779
2.	Aceh Singkil	1.986	2.029	2.428	2.344	2.329	2.010
3.	Aceh Selatan	3.407	2.295	5.555	3.328	5.402	3.195
4.	Aceh Tenggara	1.823	1.846	2.055	2.042	2.726	2.373
5.	Aceh Timur	2.885	2.625	2.666	2.613	2.564	1.864
6.	Aceh Tengah	1.122	1.099	1.308	1.439	1.258	0.728
7.	Aceh Barat	4.405	2.484	1.789	1.756	1.684	2.526
8.	Aceh Besar	5.588	5.474	5.693	5.595	6.034	4.988
9.	Pidie	2.932	2.880	1.096	1.471	1.063	2.304
10.	Bireuen	6.573	5.008	4.672	4.573	5.703	11.004
11.	Aceh Utara	8.492	3.909	5.523	5.440	5.361	4.867
12.	Aceh Barat Daya	1.855	2.025	2.950	2.901	2.854	3.057
13.	Gayo Lues	2.862	2.665	2.333	0.893	2.255	1.384
14.	Aceh Tamiang	1.186	1.379	1.917	1.823	2.142	1.225
15.	Nagan Raya	1.889	1.856	0.863	0.846	0.830	1.749
16.	Aceh Jaya	4.491	4.478	4.191	4.097	4.344	4.489
17.	Bener Meriah	0.156	0.153	2.012	1.975	1.799	2.240
18.	Pidie Jaya	7.513	2.115	4.353	4.492	4.171	6.035

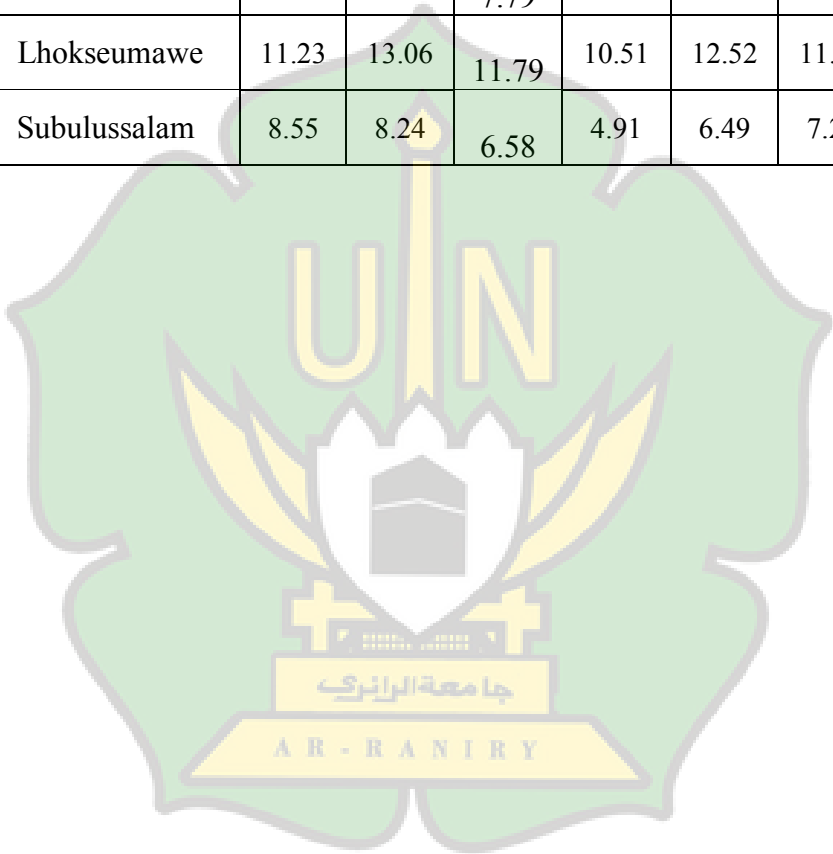
19.	Banda Aceh	1.679	1.674	1.577	1.591	1.517	1.152
20.	Sabang	1.723	1.858	1.324	0.877	1.487	1.348
21.	Langsa	2.453	2.408	1.413	1.391	2.168	2.267
22.	Lhokseumawe	3.144	2.606	2.904	1.695	4.252	2.911
23.	Subulussalam	3.867	2.966	3.792	3.671	3.644	2.541



Lampiran 3

Kabupaten/Kota		Tingkat Pemngangguran Terbuka (%)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Simeulue	5.57	8.51	5.82	3.12	4.94	5.87
2.	Aceh Singkil	6.08	7.03	7.09	7.14	8.04	8.60
3.	Aceh Selatan	9.49	10.01	8.63	7.24	6.08	6.58
4.	Aceh Tenggara	9.51	9.79	7.27	4.75	3.76	3.46
5.	Aceh Timur	10.61	13.89	11.16	8.42	6.93	7.64
6.	Aceh Tengah	3.32	3.13	5.52	3.91	2.13	2.65
7.	Aceh Barat	5.86	6.77	6.49	6.20	8.67	7.45
8.	Aceh Besar	10.53	6.81	7.65	8.49	7.30	7.75
9.	Pi d i e	11.73	10.25	8.95	7.64	7.23	6.89
10.	Bireuen	9.02	11.02	7.76	4.50	3.52	3.88
11.	Aceh Utara	13.58	17.05	14.04	11.02	10.18	8.63
12.	Aceh Barat Daya	6.79	11.66	7.41	3.16	3.95	4.30
13.	Gayo Lues	0.37	2.24	1.98	1.71	2.52	1.74
14.	Aceh Tamiang	9.75	14.03	9.73	5.43	6.25	6.07
15.	Nagan Raya	3.69	3.97	4.04	4.11	5.94	5.35
16.	Aceh Jaya	9.48	4.91	5.57	6.23	4.95	4.19
17.	Bener Meriah	0.74	1.04	1.05	1.06	1.07	1.02

18.	Pidie Jaya	8.16	9.18	7.04	4.89	5.02	4.36
19.	Banda Aceh	10.24	12.00	9.88	7.75	7.29	6.92
20.	Sabang	7.48	7.62	5.31	3.00	4.21	4.60
21.	Langsa	9.89	8.55	7.79	7.03	7.12	7.70
22.	Lhokseumawe	11.23	13.06	11.79	10.51	12.52	11.06
23.	Subulussalam	8.55	8.24	6.58	4.91	6.49	7.25



Lampiran 4

1. Common test

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/21/20 Time: 14:53

Sample: 2008 2019

Periods included: 12

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 276

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.16495	0.711055	28.35920	0.0000
TPP	0.327469	0.116281	2.816181	0.0052
TPT	-0.325397	0.082509	-3.943793	0.0001
R-squared	0.067820	Mean dependent var	18.64888	
Adjusted R-squared	0.060991	S.D. dependent var	4.601157	
S.E. of regression	4.458634	Akaike info criterion	5.838372	
Sum squared resid	5427.082	Schwarz criterion	5.877724	
Log likelihood	-802.6954	Hannan-Quinn criter.	5.854163	
F-statistic	9.931009	Durbin-Watson stat	0.590016	
Prob(F-statistic)	0.000069			

2. Fixed effect test

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/21/20 Time: 14:54

Sample: 2008 2019

Periods included: 12

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 276

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.09932	0.597770	25.25942	0.0000

TPP	0.306511	0.083532	3.669375	0.0003
TPT	0.343619	0.065439	5.250946	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.748568	Mean dependent var	18.64888
Adjusted R-squared	0.724527	S.D. dependent var	4.601157
S.E. of regression	2.414940	Akaike info criterion	4.687438
Sum squared resid	1463.816	Schwarz criterion	5.015372
Log likelihood	-621.8664	Hannan-Quinn criter.	4.819032
F-statistic	31.13682	Durbin-Watson stat	1.056196
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 5

3. Random effect test

Dependent Variable: TK

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/21/20 Time: 15:04

Sample: 2008 2019

Periods included: 12

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 276

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.64695	0.882697	17.72629	0.0000
TPP	0.288039	0.081871	3.518198	0.0005
TPT	0.279375	0.063588	4.393513	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			3.200418	0.6372
Idiosyncratic random			2.414940	0.3628
Weighted Statistics				
R-squared	0.092887	Mean dependent var		3.969132
Adjusted R-squared	0.086241	S.D. dependent var		2.609260
S.E. of regression	2.494210	Sum squared resid		1698.356
F-statistic	13.97734	Durbin-Watson stat		0.944902
Prob(F-statistic)	0.000002			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.120039	Mean dependent var		18.64888
Sum squared resid	6520.788	Durbin-Watson stat		0.388346

Lampiran 6

UJI PEMILIHAN MODEL

1. Chow test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	30.889988	(22,251)	0.0000
Cross-section Chi-square	361.657931	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/21/20 Time: 15:03

Sample: 2008 2019

Periods included: 12

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 276

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.16495	0.711055	28.35920	0.0000
TPP	0.327469	0.116281	2.816181	0.0052
TPT	-0.325397	0.082509	-3.943793	0.0001
R-squared	0.067820	Mean dependent var		18.64888
Adjusted R-squared	0.060991	S.D. dependent var		4.601157
S.E. of regression	4.458634	Akaike info criterion		5.838372
Sum squared resid	5427.082	Schwarz criterion		5.877724
Log likelihood	-802.6954	Hannan-Quinn criter.		5.854163
F-statistic	9.931009	Durbin-Watson stat		0.590016
Prob(F-statistic)	0.000069			

2. Hausman test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.216575	2	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
TPP	0.306511	0.288039	0.000275	0.2651
TPT	0.343619	0.279375	0.000239	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/21/20 Time: 15:06

Sample: 2008 2019

Periods included: 12

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 276

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.09932	0.597770	25.25942	0.0000
TPP	0.306511	0.083532	3.669375	0.0003
TPT	0.343619	0.065439	5.250946	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.748568	Mean dependent var	18.64888
Adjusted R-squared	0.724527	S.D. dependent var	4.601157
S.E. of regression	2.414940	Akaike info criterion	4.687438

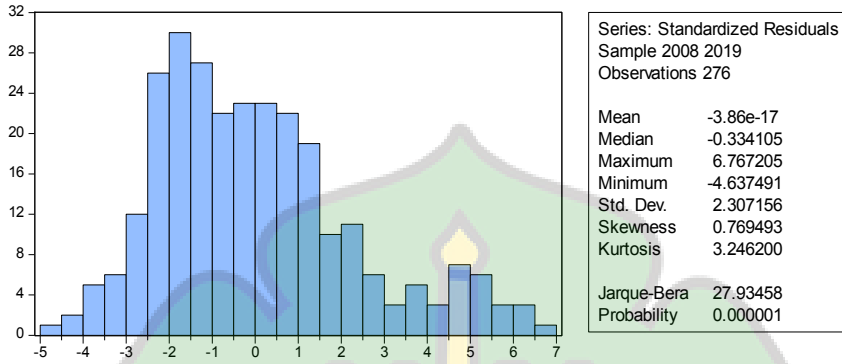
Sum squared resid	1463.816	Schwarz criterion	5.015372
Log likelihood	-621.8664	Hannan-Quinn criter.	4.819032
F-statistic	31.13682	Durbin-Watson stat	1.056196
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 7

UJI ASUMSI KLASIK

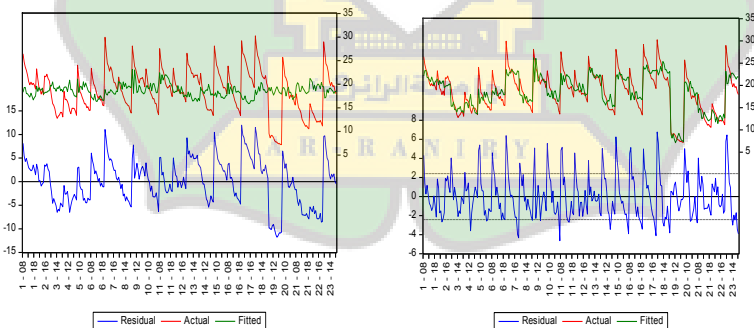
Uji Normalitas



Multikolinearitas

	LOGTK	LOGTPP	LOGTPT
LOGTK	1.000000	0.079623	-0.220711
LOGTPP	0.079623	1.000000	0.273130
LOGTPT	-0.220711	0.273130	1.000000

Heteroskedastisitas



Random effect

Fixed effect

Hasil Regresi Panel

Dependent Variable: LOGTK

Method: Panel Least Squares

Date: 07/21/20 Time: 15:30

Sample: 2008 2019

Periods included: 12

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 276

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.633424	0.042884	61.40805	0.0000
LOGTPP	0.032506	0.014694	2.212153	0.0279
LOGTPT	0.121234	0.021290	5.694320	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.815860	Mean dependent var	2.891175
Adjusted R-squared	0.798253	S.D. dependent var	0.275313
S.E. of regression	0.123660	Akaike info criterion	-1.256344
Sum squared resid	3.838264	Schwarz criterion	-0.928409
Log likelihood	198.3755	Hannan-Quinn criter.	-1.124749
F-statistic	46.33714	Durbin-Watson stat	1.026157
Prob(F-statistic)	0.000000		